



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 42 Volume 11 Juni 2015



PTSP Percepat Perizinan Ketenagalistrikan

Menteri ESDM Lantik Pejabat Eselon I dan II

35.000 MW untuk Indonesia

Ditjen Ketenagalistrikan Aktifkan Kembali Senam Pagi

Instalasi Listrik Rumah Tangga Harus Dicek Tiap 15 Tahun

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

**BERANI
JUJUR DAN
ANTI KKN,
HEBAT!**

Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

sebagai

Kawasan Anti Korupsi



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 42 Volume XII | JUNI 2015

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah
Heru Setiawan
Wiwid Mulyadi
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Fathorrahman
Hari Dwi Wijayanto
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
David F Silalahi
Ahmad Amiruddin
Novan Akhriyanto
Dina Andriani
Hening Surya Bayu A.
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta

Penyunting/ Editor

Ernawaty
Suwarno
Matilda Prameswari
Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono
Agus Supriyadi
Ajat Munajat
Novi Pravitasari
Adar

Sekretariat

Emi Tursilah
Irman Suryana
Anida Sabilawati
Rizka Octiwi
Riono Saputra

Disclaimer:

Sumber foto untuk iklan
layanan masyarakat berasal dari Google

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Pembaruan adalah hal yang tak terelakkan untuk mengubah sebuah sistem menjadi lebih baik. Pada Buletin Ketenagalistrikan edisi kali ini, kami mengangkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Tajuk Utama. PTSP BKPM merupakan salah satu pembaruan dan terobosan dalam perizinan investasi di Indonesia, termasuk perizinan bidang ketenagalistrikan. Model layanan satu pintu ini diharapkan mampu mengurai penghambat percepatan pembangunan pembangkit listrik yang salah satunya disebabkan oleh lambatnya perizinan karena melibatkan multi sektor.

Kementerian ESDM juga terus menggaungkan pembaruan melalui penyegaran pejabat eselon I dan II. Di awal Mei 2015, Menteri ESDM Sudirman Said mengambil sumpah janji 5 Pejabat Eselon I. Menteri juga melantik Pejabat Eselon II dimana 22 orang pejabat merupakan hasil rotasi dan 12 orang merupakan hasil promosi.

Pembaruan juga terasa di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dengan hadirnya 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru hasil seleksi 2014. Sementara itu, sebanyak 59 CPNS hasil seleksi tahun sebelumnya telah dilantik menjadi PNS oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman di tahun ini.

Tak hanya itu, pembaruan juga hadir melalui senam pagi di DJK setiap Jumat pagi. Senam pagi yang telah vakum setelah sekian lama kini mulai diaktifkan kembali untuk menyegarkan badan para pegawai DJK. Tak lupa, pembaruan juga hadir pada Buletin Ketenagalistrikan yang sedang Anda baca ini. Kami membuat rubrikasi semata-mata untuk tampilan dan isi buletin yang lebih baik.

Menyambut Bulan Ramadhan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga di Hari Kemenangan nanti, kita semua bisa menjadi sosok yang 'baru' dan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI



6

PTSP Percepat Perizinan Ketenagalistrikan

Dari Redaksi

Tajuk Utama

6 PTSP Percepat Perizinan Ketenagalistrikan

Liputan Khusus

- 8 Dirjen Ketenagalistrikan Sampaikan Progres Program 35.000 MW
- 9 Jokowi: 35.000 MW Tercapai Asal Semua Kerja Keras!
- 10 Menteri ESDM: Program 35.000 MW adalah Suatu Keharusan
- 12 35.000 MW untuk Indonesia

Warta Kita

- 14 Rasio Elektrifikasi 2014 Capai 84,35%
- 15 *Stakeholder* Diharap Bantu Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan
- 17 Pemerintah Optimistis Tambah Kapasitas Pembangkit Rata-Rata 7 GW Per tahun
- 18 Menteri ESDM Tandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi
- 19 Dirjen Ketenagalistrikan Pimpin Rakor dengan Kadis ESDM Provinsi Se-Indonesia
- 20 Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakor Lisdes Seluruh Indonesia
- 22 Investor Jepang Tertarik Program 35.000 MW
- 23 Delegasi Pemerintah Mesir Kunjungi Kantor Ditjen Ketenagalistrikan
- 25 Wapres: Listrik Infrastruktur Tak Tergantikan
- 26 Pemerintah Atur Usaha Penyediaan Listrik Rusun dan Apartemen
- 27 Menteri ESDM Lantik Pejabat Eselon I dan II
- 28 35 Asesor Perdana Bidang Ketenagalistrikan Dapatkan SK Dirjen
- 29 Dirjen Ketenagalistrikan Buka Pertemuan Kedua Penyusunan ASEAN *Energy Outlook*



25

Wapres: Listrik Infrastruktur Tak Tergantikan

- 30 59 PNS DJK Diambil Sumpah Jabatan
- 31 Dirjen Ketenagalistrikan Sambut 28 CPNS
- 32 Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan
- 33 Inspektur Ketenagalistrikan Pastikan Ketersediaan Listrik Beberapa Sekolah di Provinsi DKI Jakarta
- 43 Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakorber KONSUIL-PPILN Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
- 49 Menyambut Bulan Ramadhan, Menteri ESDM Adakan Temu Ramah dengan Stakeholder
- 50 Instalasi Listrik Rumah Tangga Harus Dicek Tiap 15 Tahun
- 51 Hindari Bahaya, Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan Wajib Dipenuhi
- 50 MKI Sumbang Pemikiran untuk Program 35.000 MW
- 53 Pemaparan Program 35.000 MW dalam Indonesia *Electricity Show* 2015
- 54 Sekilas Tentang Program Listrik Perdesaan
- 55 Ditjen Ketenagalistrikan Meriahkan Pameran AITIS 2015
- 58 Ditjen Ketenagalistrikan Aktifkan Kembali Senam Pagi

Resensi Buku

- 16 Gagalnya Sistem Kanal

Galeri

- 38 Peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015

Pojok Peraturan

- 44 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari –Juni 2015

Tips

- 56 Seni Berbicara ala Larry King

Kolom

- 34 **Pelaksanaan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Kualitas Lingkungan Global**
Oleh: HS Bayu Anggoro
- 42 **Inspeksi Pltu Tanjung Awar-Awar 2 x 350 MW**
Oleh: Ahmad Amiruddin & Irfan Kurniawan
- 46 **Lampu Solar Hemat Energi "Liter of Light Project"**
Oleh: David F Silalahi
- 39 **Tinjauan Aplikasi E-Monev Sesuai dengan PP No.39 Tahun 2006**
Oleh : Hari Dwi Wijayanto



18

Menteri ESDM Tandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi



31

Dirjen Ketenagalistrikan Sambut 28 CPNS



48

Instalasi Listrik Rumah Tangga Harus Dicek Tiap 15 Tahun



56

Ditjen Ketenagalistrikan Aktifkan Kembali Senam Pagi

PTSP Percepat Perizinan Ketenagalistrikan

Perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik selama ini menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan pembangkit listrik. Untuk mengurai permasalahan tersebut, sejak Januari 2015 pemerintah menyatukan perizinan pembangunan pembangkit listrik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) sementara dan tetap, penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) yang selama ini dilayani di kantor Ditjen Ketenagalistrikan saat ini dilayani di PTSP BKPM bersama perizinan-perizinan lainnya.

Untuk mendapatkan informasi mengenai

program-program pembangunan pembangkit listrik, calon investor dapat mengunjungi PTSP BKPM di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta. Masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui website www.bkpm.go.id untuk mendapatkan informasi seputar PTSP di BKPM.

Untuk mendapatkan informasi mengenai program-program di sektor ketenagalistrikan, masyarakat masih dapat mengunjungi ruang pelayanan informasi investasi Ditjen Ketenagalistrikan atau mengakses website www.kiosk.esdm.go.id.

Berdasarkan data dari PTSP BKPM, jumlah perizinan yang telah diterbitkan sejak *soft launching* di PTSP Pusat yaitu tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 adalah sebanyak

107 Izin Usaha Ketenagalistrikan, dengan rincian sebagai berikut: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S) sebanyak 22 IUPL-Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Tetap sebanyak 14 IUPL Tetap, Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 6 IUJPTL, Surat Keterangan Terdaftar untuk Panas Bumi sebanyak 64 SKT Panas Bumi, dan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebanyak 1 Penetapan Wilayah. Dari data PTSP BKPM, rata-rata waktu penerbitan izin usaha ketenagalistrikan yaitu dalam 5 hari kerja.

Untuk meningkatkan percepatan perizinan di sektor ketenagalistrikan, saat ini pemerintah mengupayakan percepatan waktu pengurusan izin pertanahan yang terkait sektor agraria,



Seorang pegawai di PTSP BKPM sedang melayani calon investor. PTSP merupakan sebuah terobosan untuk mempermudah dan mempersingkat perizinan investasi di Indonesia.



Ruang tunggu di PTSP BKPM dipenuhi calon investor yang berminat untuk melakukan investasi di Indonesia.

kehutanan, dan perhubungan. Ketiga sektor tersebut berkaitan erat dengan percepatan perizinan terintegrasi (*end to end*) ketenagalistrikan.

Berdasarkan data dari PTSP BKPM, saat ini lama waktu perizinan untuk pemilihan langsung *Independent Power Producer* (IPP) telah dipersingkat dari 930 hari kerja menjadi 256 hari kerja. Pemerintah juga terus melakukan upaya mempersingkat perizinan

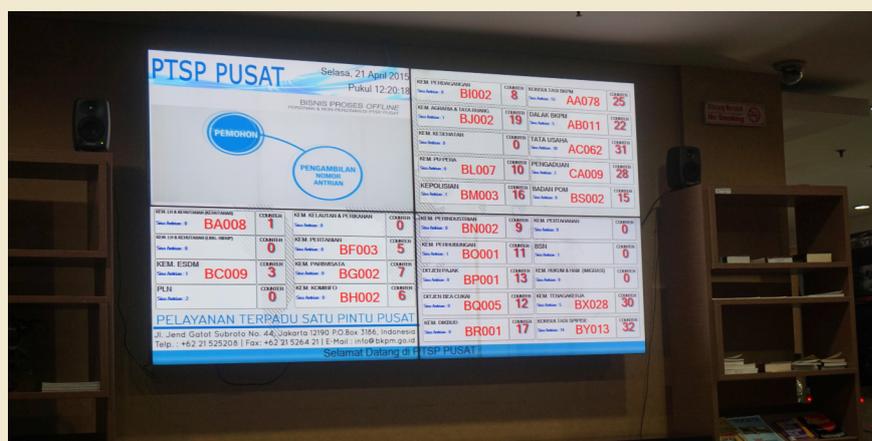
sektor pertanian/agraria dan sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Penyederhanaan Perizinan sektor agraria/pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanian dalam Kegiatan Penanaman Modal. Percepatan yang dilakukan antara lain pengukuran bidang tanah

yang luasnya lebih dari 1.000 hektar dari 41 hari kerja menjadi 20 hari kerja. Kemudian, izin hak guna usaha (HGU) yang luasnya lebih dari 6 ribu hektar membutuhkan waktu 90 hari kerja dari sebelumnya tidak ada batasan waktu pengurusan yang pasti, serta izin hak guna bangunan lebih dari 15 hektar dari 86 hari kerja menjadi 50 hari kerja (untuk sektor ketenagalistrikan, umumnya luas tanah yang dibutuhkan adalah 200 hektar).

Penyederhanaan perizinan terkait sektor kehutanan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan PTSP, antara lain, izin Pelepasan Kawasan Hutan dari 111 hari kerja menjadi 47 hari kerja.

Kemudian, izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang dari 90 hari kerja menjadi 52 hari kerja, dan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survei/Eksplorasi dari 110 hari kerja menjadi 52 hari kerja. (PSJ)



Kiri: PTSP BKPM menyediakan mesin antrian otomatis yang bisa langsung diakses oleh pengunjung sebelum memasuki ruang tunggu

Kanan: Melalui layar monitor, pengunjung dapat mengetahui urutan antrian di konter-konter yang ada di PTSP BKPM

Dirjen Ketenagalistrikan Sampaikan Progres Program 35.000 MW

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ir. Jarman M.Sc menyampaikan status terkini program pembangunan pembangkit listrik 42,9 GW yang ditargetkan selesai tahun 2019.

"Kami membaginya ke dalam dua kelompok: PLN dan IPP," ungkap Jarman. Menurutnya, Proyek PLN dan IPP tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori konstruksi, pengadaan, *committed*, dan *plan*. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat menyampaikan *keynote speech* dalam seminar rangkaian Indonesia Electricity Show, yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jumat (20/3).

Menurut Jarman, saat ini progres pembangkit listrik yang telah masuk tahap konstruksi ada 7,4 GW. Dari total kapasitas konstruksi tersebut, pembangkit PLN (4,2) GW adalah pembangkit yang sudah efektif kontrak EPC. Sedangkan IPP (3,2 GW) adalah IPP yang sudah tercapai *financial close* (FC). Menurut Jarman, ada 7,2 GW pembangkit PLN dan IPP yang sudah *committed*, yaitu PLN sedang dalam proses pengadaan kontraktor EPC dan IPP yang proses pengadaan sampai ke PPA.

Dalam paparannya, Jarman menyampaikan bahwa total kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit tahun 2015 s.d. 2019 sekitar 42,9 GW. Dari total kapasitas tersebut, 7,4 GW adalah proyek yang sedang tahap konstruksi yang berasal dari program FTP 1, sebagian FTP 2 dan proyek regular sedangkan 35,5 GW adalah rencana pemerintah. Selain konstruksi, yang

masuk ke dalam kategori *committed* ada 7,2 GW. "Masuk dalam kategori ini adalah PLN yang sumber pendanaan sudah ada, dan IPP dimana sudah ditanda-tangani oleh PPA, namun *financial close* (FC) belum tercapai," ungkap Jarman.

dibangun pula gardu induk dengan total 108.789 MVA dan jaringan transmisi dengan panjang total 46.597 kms.

Jarman optimistis program 35.000 MW akan selesai tepat waktu. Selain menerapkan delapan langkah solusi,



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjadi pembicara dalam Indonesia Electricity Show 2015 di Jakarta. Jarman membahas update terkini Program 35.000 MW.

Ia juga menyampaikan bahwa 13,5 GW kapasitas pembangkit program 35.000 MW telah masuk tahap pengadaan, sedangkan sisanya 14,7 GW masih dalam persiapan pengadaan dan atau pendanaan. Seperti disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tahun 2015-2024 diproyeksikan rata-rata sekitar 8.7% per tahun. Untuk itu, menurutnya diperlukan kebutuhan 7.000 MW setiap tahun.

"Bukan ditargetkan, tapi merupakan suatu kebutuhan," ungkap Jarman. Selain akan membangun pembangkit listrik sebanyak 35.000 MW, akan

pemerintah juga melihat komitmen dari IPP ekspansi untuk berpartisipasi dalam program ini. Jarman memberi contoh PLTU Jeneponto, Sulawesi Selatan yang baru saja *groundbreaking* untuk proyek ekspansi.

"Target Jeneponto adalah 26 bulan sejak *groundbreaking*, saya rasa hal tersebut masuk akal," ungkapnya. Ia juga mencontohkan PLTU Cilacap Ekspansi yang dapat COD lebih cepat satu tahun dari rencana. "Kalau ekspansi itu cepat. Untuk itu separuh dari IPP akan ditambahkan dari Ekspansi," jelasnya. (PSJ)

Jokowi : 35.000 MW Tercapai Asal Semua Kerja Keras!



Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada jajaran direksi dan manajer PT PLN (persero) di kantor pusat PLN di Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) optimistis program 35.000 MW yang akan dibangun lima tahun ke depan dapat tercapai asal semua kerja keras. Jokowi mengetahui bahwa program percepatan pembangkit tahap I dan II yang direncanakan sepuluh tahun yang lalu tidak berjalan dengan maksimal. Namun ia yakin dengan kerja keras, pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW dapat terbangun dalam lima tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran direksi dan manajer PT PLN (Persero), di kantor pusat PT PLN, Selasa (7/4). Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan Kepala Bagian Rencana dan Laporan Totoh Abdul Fatah.

Jokowi mengaku bahwa ia menghitung sendiri kebutuhan listrik selama lima tahun ke depan. Menurutnya untuk mendukung perekonomian, serta menarik investor dan wisatawan, kebutuhan listrik yang diperlukan

rata-rata mencapai 5.000 MW per tahun. Jokowi pun bercerita pada saat menyampaikan rencananya untuk membangun 35.000 MW dalam lima tahun, banyak pihak pesimistis.

"Saat pertama kali saya sampaikan di rapat kabinet semua pesimis," ungkap Jokowi. Tapi Presiden meyakini bahwa hal tersebut bisa dilakukan. "Insya Allah bisa, asal semua kerja keras," ungkap Jokowi. Jokowi lalu meminta jajaran Direksi PLN untuk membuat perencanaan dan memaparkannya. "Ternyata bisa dan semua menjadi optimis dan yakin," ungkap Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa biasanya satu *project* pembangkit IPP yang meminati hanya satu atau dua perusahaan. Sekarang menurut laporan Dirut PT PLN, yang mengantri bisa sampai lima belas. Jokowi mengapresiasi hal tersebut dan meminta PLN untuk memilih satu yang paling bagus diantara perusahaan-perusahaan peminat *project*. Pemerintah menurut Jokowi telah menyiapkan langkah-langkah

salah satunya mempermudah perizinan di sektor ketenagalistrikan. "Dulu saya menjumpai ada yang memproses perizinan listrik sampai dua tahun," ungkap Jokowi. Saat ini pelayanan kelistrikan dapat dipercepat dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.

Menurut Presiden, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada industri yang berkualitas ekspor. Untuk itu menurutnya kebutuhan listrik harus cukup. Presiden berpesan untuk menggunakan muatan lokal (*local content*) untuk proyek-proyek kelistrikan, baik jaringan transmisi maupun pembangkit. Jokowi juga meminta PLN memberikan prioritas untuk pembangunan pembangkit listrik di Indonesia bagian timur seperti Papua dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur.

"Supaya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah dan antar masyarakat yang ada di negara kita, saya titip itu," tutup Jokowi. (PSJ)

Senin, 30 Maret 2015

Balai Tirta,

Menteri ESDM Sudirman Said mengingatkan bahwa jika tidak berhati-hati, Indonesia akan memasuki krisis listrik. Sudirman mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi nasional di UI Depok.

Menteri ESDM : Program 35.000 MW adalah Suatu Keharusan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW dalam lima tahun bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tapi suatu keharusan. Ia juga menegaskan bahwa *discourse* mengenai energi jangan hanya sebatas pada Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi harus lebih besar dari pada itu.

Menurutnya masa depan energi terletak pada energi baru terbarukan dan konservasi energi. Sudirman Said juga mengapresiasi gerakan hari bumi dengan program *Earth Hour* yang dilaksanakan Sabtu (28/3) lalu. Ia mengandaikan jika program *Earth Hour* dijalankan oleh masyarakat setiap hari, ketersediaan listrik dapat dihemat setiap harinya.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi nasional dengan tema 'Kebijakan dan Langkah Strategis

dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan' yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI). Acara yang digelar di Balai Rung Universitas Indonesia, Depok, Senin (30/3) ini dimoderatori oleh Effendi Ghazali dan menghadirkan pembicara lain seperti Rizal Ramli dari BPK RI, Anwar Nasution dari akademisi FEB UI, serta Adhi Setiawan Direktur TREC FTUI.

Seminar ini sendiri digelar untuk mensinergikan pemikiran, ide, dan usulan dari akademisi, yayasan, lembaga, dan pemerintah daerah maupun pusat dalam perbaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sudirman Said mengajak semua pihak untuk mengubah pola pikir atau paradigma terhadap energi, khususnya energi listrik. "Pola pikir pembangunan energi kita harus diubah menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi,"

tegasnya. Di sektor migas misalnya, ia mengajak masyarakat untuk melihat migas bukan sebagai sumber utama penghasilan negara, tapi pemberi nilai tambah.

Untuk itu, dalam mengelola energi semua pihak diharap berpikir jangka panjang. Menurutnya, kondisi energi saat ini adalah konsekuensi dari penataan energi di masa lalu, sedangkan apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh pada kondisi energi yang akan datang.

Dalam memaparkan kondisi kelistrikan nasional, Menteri ESDM menjelaskan bahwa jika tidak berhati-hati, Indonesia akan memasuki krisis listrik. "Bahkan sebagian sudah masuk kategori krisis," papar Menteri. Menurut pemaparannya, dari 22 sistem kelistrikan, hanya 6 normal yang aman, sedangkan sistem lainnya dalam kondisi siaga dan defisit.

Dari perkembangan rasio elektrifikasi,

kondisinya memang meningkat dari tahun ke tahun. Namun menurutnya perkembangannya tidak secepat *demand* atau kebutuhan listrik. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi meningkatkan rasio elektrifikasi ini.

"Harus ngebut sehingga akhir 2019 mendekati 99% rasio elektrifikasi," ujarnya. Menteri ESDM mengatakan bahwa perkembangan rasio elektrifikasi di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain karena tidak ada negara kondisi geografisnya seperti Indonesia.

Untuk menjalankan program 35.000 MW, menurutnya pemerintah telah belajar dari pengalaman FTP I dan II.

"Banyak pelajaran dari FTP I dan FTP II, ada delapan hal yang menjadi permasalahan," ungkap Sudirman Said.

Salah satu hal yang memperlama adalah proses negosiasi harga PLN dan IPP yang selama ini banyak memakan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (depan-kanan) menyimak dengan seksama paparan dari Menteri ESDM mengenai Program 35.000 MW.



Peserta diskusi nasional berasal dari kalangan akademisi, pemerintah dan swasta. Seminar ini digagas untuk mensinergikan pemikiran, ide, dan usulan terkait perbaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

waktu. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga patokan untuk mempermudah PLN dan IPP dalam proses negosiasi.

Mengenai proses perizinan pembangunan pembangkit listrik yang memakan banyak waktu, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perizinan ketenagalistrikan di

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri ESDM berharap Pemerintah Daerah dapat meniru sistem PTSP yang telah berjalan di BKPM untuk mempermudah perizinan di tingkat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian pada pembebasan lahan.

Kebijakan lain yang dikeluarkan Menteri ESDM adalah penunjukan langsung pembangunan pembangkit IPP yang sudah jalan dan mau melakukan ekspansi. Pemilik tambang batubara yang membangun listrik di mulut tambang juga dapat ditunjuk tanpa tender. Hal tersebut berlaku juga untuk kawasan industri yang memiliki *excess power*. Menteri ESDM berharap PLN dan swasta dapat berbagi peran dalam program 35.000 MW ini.

"Program sebesar itu tidak dapat dikerjakan PLN sendiri. PLN akan fokus di transmisi," ungkap Menteri. "Kerjakan paling banyak 10.000 MW. Sedangkan 25.000 MW akan dikerjakan swasta," tambahnya. Bahkan Menteri ESDM saat ini tengah mempertimbangkan dukungan swasta dalam membangun transmisi. (PSJ)

35.000 MW untuk Indonesia

Senin (4/5) lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meluncurkan Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW di Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program 35.000 MW ini merupakan salah satu program unggulan dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Peluncuran program ini ditandai dengan penandatanganan *Power Purchased Agreement* (PPA) dan *Letter of Intent* (LoI) untuk EPC (*engineering, procurement, construction*) serta *groundbreaking* beberapa pembangkit.

Beberapa pembangkit yang akan dilakukan PPA, LoI dan *groundbreaking* antara lain penandatanganan PPA untuk PLTB Samas, Yogyakarta (50 MW), PLTU Kendari-3, Sulawesi Tenggara (2 x 50 MW), PLTU Jeneponto Ekspansi, Sulawesi Selatan (2x125 MW), PLTA Malea, Sulawesi Selatan (2x45 MW), penandatanganan LoI untuk EPC PLTU Grati, Jawa Timur (450 MW), serta *groundbreaking* PLTA Jatigede, Jawa Barat (2 x 55 MW), PLTU Takalar, Sulawesi Selatan (2 x 100 MW), dan PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4, Sumatera Utara, (2 x 220 MW).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) untuk beberapa proyek kelistrikan di antaranya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara Conoco Phillips Grissik Ltd. dengan PT. PLN dengan periode

kontrak selama 3 (tiga) tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US\$ 201 juta. Dilakukan juga amandemen PJBG antara Petroselat dengan PT. PLN dengan periode kontrak selama 5 tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US\$ 15,7 juta, serta HoA antara Petrochina dengan PT. Bumi Samudra Perkasa dengan periode kontrak selama 7 tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US\$ 82,6 juta.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proyek 35.000 MW adalah utang terhadap masyarakat dengan defisit listrik. "Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, namun baru 50.000 MW yang dibangun Pemerintah, sehingga banyak yang menyangsikan pembangunan 35.000 MW dalam waktu lima tahun," ungkap Jokowi.

Ia menambahkan bahwa proyek ini bukanlah proyek ambisius, akan tetapi merupakan hutang terhadap masyarakat yang mengalami defisit listrik.

"Saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 84%, dimana telah ditargetkan oleh pemerintah bahwa pada tahun 2024, angka ini sudah mencapai 99,4%. Kebutuhan listrik turut mengalami kenaikan sebesar 8,7% per tahun, dari tingkat 219,1 TWH pada tahun ini, diperkirakan akan mencapai 464,2 TWH pada tahun 2024," lanjutnya.

Kebutuhan Tambahan 7 GW Per Tahun

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kegiatan perekonomian Indonesia tidak akan bisa terlepas dari pasokan listrik yang cukup, handal, dan ramah lingkungan.

Seiring meningkatnya konsumsi listrik, kebutuhan pasokan listrik di Indonesia terus meningkat. Selama kurun waktu 2015-2019 yang akan datang, diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 7 GW per tahun dan tambahan jaringan transmisi rata-rata 9,3 ribu kms per tahun.

Untuk itu, dalam lima tahun ke depan diperlukan tambahan pembangkit baru dengan total kapasitas sekitar 35,5 GW, di luar proyek pembangkit yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan total kapasitas mencapai 7,4 GW, serta tambahan jaringan transmisi sekitar 46,5 ribu kms.

Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074K/21/MEM/2015 telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015 s.d. 2024. Rencana penyediaan tenaga listrik PLN selama 10 tahun mendatang ini menguraikan rencana pembangunan pembangkit 35.000 MW beserta infrastruktur ketenagalistrikan lainnya untuk periode tahun 2015-2019. Sesuai RUPTL tersebut total pembangkit yang akan dibangun sampai dengan tahun 2019 adalah 42,9 GW, dimana 42% atau 18 GW akan dibangun oleh PLN, sedangkan 58% sisanya atau 24,9 GW akan dibangun oleh swasta melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPP).

Langkah Cepat Pemerintah

Untuk mempercepat dan mendorong keberhasilan pembangunan ketenagalistrikan, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah, seperti memberlakukan UU No. 2/2012 untuk pembebasan dan penyediaan lahan, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu



Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan program 35.000 MW di Bantul DIY, Senin (4/5)

Pintu (PTSP) yang dikoordinasikan oleh BKPM, serta menerbitkan regulasi yang mendorong dan memberikan kepastian berinvestasi bagi swasta di bidang tenaga listrik.

Pada awal tahun 2015 ini Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa regulasi penting untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan. Regulasi pertama adalah Permen ESDM No. 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik. Permen ESDM ini mengatur, antara lain tentang kerjasama antar pemegang wilayah usaha, pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik (*power wheeling*), interkoneksi jaringan tenaga listrik, serta pembelian kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi (IO).

Dengan terbitnya peraturan ini, antar pemegang wilayah usaha dapat bekerja sama secara langsung dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Usaha Transmisi diwajibkan membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi, sedangkan

Usaha Distribusi dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemegang IO dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Listrik (IUPL) yang memiliki wilayah usaha. Sementara itu, pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha juga dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang IO.

Regulasi kedua yang dikeluarkan untuk mendorong pembangunan kelistrikan adalah Permen ESDM No. 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi. Peraturan ini melengkapi aturan jaringan sistem tenaga listrik di Jawa-Bali, dan sistem Sumatera yang telah diterbitkan sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Aturan Jaringan tersebut antara lain mengenai manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan perencanaan dan pelaksanaan operasi, aturan transaksi tenaga listrik, aturan metering, aturan kebutuhan data, serta aturan tambahan. Pada tahun ini direncanakan akan disusun juga

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan. Selanjutnya Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan Permen ESDM No. 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Peraturan ini disusun untuk mempercepat pengembangan pembangkit tenaga listrik oleh PLN, mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi), memberikan kepastian/keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik, serta membangun iklim investasi yang lebih kondusif.

Program Ramah Lingkungan

Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW adalah program yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Lebih dari 3.600 MW dari program ini adalah pembangkit berbasis energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dimana energi terbarukan akan terus dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, sehingga ketahanan energi nasional dapat direalisasikan.

Selain ramah lingkungan, program ini dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya program ini, maka investasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat serta dapat membuka lapangan kerja secara langsung bagi masyarakat luas. Dengan total proyek pembangkit 42,9 GW diperkirakan akan menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja dengan total investasi sekitar Rp. 1.189 triliun. (PSJ)

Rasio Elektrifikasi 2014 Capai 84,35%

Rasio Elektrifikasi Nasional hingga akhir tahun 2014 mencapai 84,35 %. Angka ini melebihi target 2014 sebesar 81,51%. Pemerintah pusat melalui Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM meminta kerjasama pemerintah daerah untuk mensukseskan program peningkatan rasio elektrifikasi ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad saat menyampaikan presentasi dalam Rapat Koordinasi antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi, Selasa (10/3).

Menurutnya pemerintah daerah perlu memperhatikan target RE tahun 2020 sebesar 99%. "Memang masih ada beberapa daerah yang dibawah 50%, yaitu Papua. Sedangkan di daerah lain sudah di atas 50%. Diharapkan tahun 2020 tercapai RE sebesar 99%," jelas Munir.

Untuk mencapai target tersebut, selain menambah kapasitas pembangkit listrik, pembangunan listrik perdesaan merupakan solusi dari peningkatan rasio elektrifikasi ini. Listrik perdesaan sendiri merupakan program pemerintah untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah.

Cara yang dilakukan dalam program ini adalah melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusun tersebut belum berlistrik, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Selain itu pemerintah pusat melaksanakan program instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan.

Saat ini sebagian pembangunan listrik perdesaan juga dilakukan oleh Pemda melalui pendanaan APBD. Pembangunan listrik perdesaan oleh Pemda berupa penambahan jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang berkoordinasi dengan

akhir tahun 2014 mencapai 53.585 MW. "Kapasitas ini didapatkan dari pembangkit PLN sebesar 37.280 MW, *Indendent Power Producers* (IPP) sebanyak 10.995 MW, *Public Private Utility* (PPU) sebesar 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW," jelasnya.



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad saat menyampaikan presentasi dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi.

PT PLN (Persero). Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tentu menjadi harapan bersama untuk mencapai target melistriki masyarakat yang belum mendapatkan listrik.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri kepala dinas ESDM Provinsi ESDM tersebut, Munir juga menyampaikan *update* terbaru kondisi ketenagalistrikan serta menjelaskan program-program kelistrikan ke depan, khususnya yang terkait dengan program 35.000 MW.

Di awal presentasinya Munir menyampaikan bahwa total kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga

Munir juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tahun 2015-2024 diproyeksikan rata-rata sekitar 8.7% per tahun. Ia juga menyampaikan target tambahan kapasitas pembangkit tahun 2015 s.d. 2019 yang mencapai sekitar 42,9 GW. 7,4 GW merupakan pembangkit yang tengah tahap konstruksi, sedangkan 35,5 GW lainnya adalah rencana pembangkit yang akan dibangun PLN bersama IPP.

Dengan informasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat ikut mensukseskan dan mensinergikan kebijakan di daerahnya. (PSJ)

Stakeholder Diharap Bantu Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono meminta perusahaan dan kontraktor instalasi listrik untuk membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan ketenagalistrikan.

Agoes meminta *stakeholder* ketenagalistrikan untuk turun langsung ke lapangan dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat saat menjelaskan tentang bahaya listrik. Hal tersebut disampaikan Agoes saat memberikan sambutan dalam acara Bhakti Sosial yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN), Senin (16/3).

Acara yang digelar di Balai Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini dilaksanakan untuk memperingati HUT PPILN ke-3. PPILN memberikan pemasangan instalasi listrik di tempat-tempat ibadah, serta pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang usianya di atas 15 tahun. Kegiatan yang digelar untuk pertama kalinya ini dilaksanakan di 20 desa yang tersebar

di 14 Kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Direktur Utama PPILN Edi Sayudi berharap acara di Kabupaten Demak ini dapat ditiru oleh PPILN wilayah lain di seluruh Indonesia.

Menurut Agoes, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa bakti sosial memeriksa instalasi listrik yang lebih dari 15 tahun adalah langkah sederhana yang patut ditiru. Saat ini menurut Agoes masyarakat menganggap listrik itu biasa dan tidak berbahaya, untuk itu perlu diberikan pemahaman yang baik melalui kata-kata yang mudah dimengerti. "Berikan tindakan-tindakan yang sederhana, berikan contoh, yang salah ini, mereka akan mudah mengerti," tegas Agoes.

Pemerintah berharap *stakeholder* ketenagalistrikan dapat membantu menerangkan tentang pentingnya berhati-hati dalam menggunakan listrik. Masyarakat harus tahu aturan-aturan keselamatan ketenagalistrikan.

"Tunjukkan kepada mereka, didik, dan jelaskan bahwa listrik itu berbahaya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar menggunakan listrik dengan baik dan

benar," lanjutnya. Tujuannya menurut Agoes adalah untuk menghindari bahaya akibat listrik.

Menurut Agoes, media massa sering menyalahkan listrik sebagai 'tersangka' akibat kebakaran. Padahal menurutnya hal tersebut perlu pembuktian. Jika bukan diakibatkan oleh listrik, seharusnya media memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat. Ia berharap media membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana memasang instalasi dengan baik dan benar. Salah satunya adalah steker atau colokan listrik jangan bertumpuk-tumpuk karena bisa panas dan menimbulkan percikan api. "Sosialisasi dengan metode yang menarik, saya rasa masyarakat mudah mengerti," ungkapnya.

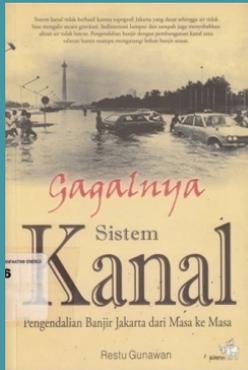
Pemerintah menyambut baik kegiatan PPILN untuk bakti sosial pemasangan dan pemeriksaan instalasi di tempat ibadah yang telah berusia lama. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan memicu kegiatan serupa di daerah-daerah lain. (PSJ)



Kiri: Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono saat mengunjungi kantor PPILN di Demak
Tengah: Agoes Triboesono menyampaikan sambutan dalam acara Bhakti Sosial PPILN
Kanan: Pemberian santunan kepada warga serempat

Gagalnya Sistem Kanal: Pengendali Banjir Jakarta dari Masa ke Masa

Oleh: Ernawaty/Pustakawan Madya



Judul buku : Gagalnya Sistem Kanal: Pengendali Banjir Jakarta dari Masa ke Masa
Penulis : Restu Gunawan
Penerbit : Kompas Media Nusantara, 2010
Tebal : ix + 398 hlm.

Karya tulis ini merupakan adaptasi dari disertasi penulis yang berjudul "Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta 1911-1985". Buku ini akan memaparkan bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat Jakarta dalam mengendalikan banjir yang merupakan gejala alam dikaitkan dengan gejala sosial dan budaya masyarakat.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, banjir bahkan tidak hanya menjadi masalah sosial ekonomi, tetapi juga menjadi fenomena politik. Pada tanggal 8 Agustus 2007, Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan pemilihan Gubernur Kepala Daerah periode 2007-2012, dengan menampilkan dua calon yaitu Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo. Dalam programnya kedua kandidat menempatkan masalah banjir sebagai prioritas utama yang harus ditangani.

Fauzi Bowo dalam janji kampanyenya mengatakan bahwa solusi yang disiapkan untuk mengatasi banjir adalah mempercepat penyelesaian pengerjaan kanal banjir timur, normalisasi kanal banjir barat dan sungai yang melintasi Jakarta: Ciliwung, Pesanggrahan, Krukut serta pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana banjir. Sementara itu, Adang Daradjatun berjanji akan mempercepat pembangunan kanal banjir timur, perbaikan drainase kota, revitalisasi daerah aliran sungai, kawasan hijau dan daerah resapan air.

Meskipun janji kampanye itu dianggap normatif dan tidak melihat realitas yang sebenarnya, karena tidak dikaitkan dengan kondisi keuangan dan realitas sosial masyarakat Jakarta, tetapi hal ini memperlihatkan bahwa pengendalian

banjir tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga masuk ke dalam ranah politik. Terbukti untuk memenangkan pilkada, para kandidat gubernur harus bisa menjamin bahwa masyarakat Jakarta tidak kebanjiran lagi.

Janji kampanye yang disampaikan oleh calon Gubernur tersebut wajar saja mengingat Jakarta setiap tahun dilanda banjir dan ada kecenderungan wilayah yang dilanda banjir semakin luas. Misalnya daerah Grogol dan Petamburan yang berada di dekat Kali Jeling anak sungai Ciliwung, terkena banjir sejak tahun 1970-an.

Sementara itu, daerah Bidara Cina mulai dilanda banjir sejak tahun 1960-an. Hal yang sama juga terjadi di daerah Pondok Aren, Tangerang, yang berdekatan dengan sungai Pesanggrahan, daerah ini dilanda banjir sejak tahun 1970-an. Banjir terjadi karena adanya pengembang (developer) yang membangun kompleks perumahan di sekitar Pondok Aren.

Banjir yang terjadi di suatu wilayah sangat terkait dengan kondisi alam dan penataan kota. Kondisi alam yang menyangkut faktor geografi seperti geologi, iklim, curah hujan, dan geomorfologi merupakan unsur yang perubahannya berjalan lambat bahkan bisa ratusan tahun. Selain faktor geografi, hal lain yang mempengaruhi besar kecilnya banjir adalah kebijakan penataan kota Jakarta yang meliputi pembangunan kota dan perilaku penduduknya.

Pemerintah Optimistis Tambah Kapasitas Pembangkit Rata-Rata 7 GW Per tahun



Dalam 'Indonesia Power Project Finance 2015', Dirjen Ketenagalistrikan Jarman memaparkan rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 84,51%.

Pemerintah kembali menegaskan optimismenya untuk dapat membangun pembangkit listrik 4,2 GW dalam lima tahun ke depan. Tidak tercapainya target program percepatan pembangunan pembangkit listrik (FTP) tahap I dan II bukan menjadi alasan untuk pesimis. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ir. Jarman M.Sc saat menyampaikan presentasi 'Masterplan on Indonesia Power Plant Development' dalam 'Indonesia Power Project Finance 2015 Conference' yang diselenggarakan oleh Petromindo.com di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut Jarman memang jika melihat FTP I, yang beroperasi baru 80% dari target. "Namun jika kita gabungkan dengan pembangkit reguler dari 2010 awal sampai akhir 2014, ada 17.470 MW yang terbangun, atau rata-rata 3.500 MW per tahun," ungkapnya.

Oleh karena itu perlu berbagai terobosan yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik lima tahun ke depan rata-rata 7.000 MW per tahun. Jarman mengungkapkan delapan langkah yang

telah disiapkan pemerintah untuk membangun 4,2 GW dengan komposisi bauran energi yang sesuai dengan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Hingga akhir 2009, bauran energi (*energy mix*) pembangkit listrik ditargetkan 62,88% dari batubara, dan 25,78% dari gas. Selain itu bahan bakar dari air sebanyak 4,98%, biomass 0,01%, panas bumi 4,21%, dan bahan bakar minyak sebanyak 1,75%. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di tahun 2019. Untuk estimasi 2015 menurut Jarman, pemerintah akan menaikkan bauran

energi dari sektor energi baru dan terbarukan seperti air, panas bumi, angin, surya, biomassa, bahkan jika memungkinkan nuklir.

J a r m a n memaparkan bahwa akhir tahun 2014 kapasitas

terpasang pembangkit listrik Indonesia mencapai 53.585 MW dengan kapasitas PLN sebesar 37.280 MW, IPP sebesar 10.995 MW, PPU sebanyak 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW. Ia juga memaparkan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 84,35%, dimana melebihi target RPJMN 81,51%.

"Artinya masih ada 15,6% atau 10 juta kepala keluarga Indonesia belum terlistriki," ungkap Jarman.

Dalam kesempatan tersebut, Jarman juga memaparkan beberapa daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik. Data awal maret, dari 22 sistem besar Indonesia, yang normal atau cadangan diatas 20% baru 6 sistem, yang siaga 11 sistem, dan sisanya kondisi defisit. "Defisit ini artinya pasokan kurang dari kebutuhan, sehingga terjadi pemadaman sebagian secara bergilir," ungkap Jarman.

Kelima sistem yang mengalami kondisi defisit saat ini adalah NTT, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan mengundang investor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam usaha penyediaan dan penunjang ketenagalistrikan. (PSJ)



Peserta konferensi menyimak paparan dari Dirjen Ketenagalistrikan.

Menteri ESDM Tandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Kementerian ESDM konsisten dengan komitmennya dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (13/4). Acara dihadiri oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain, Ketua Komisi VII DPR RI Wardaya Karnika, serta pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.



Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi oleh Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan pimpinan KPK Zulkarnain (kiri)

Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Permen ini mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi dan jenis dari gratifikasi. Mengawali sambutannya, Menteri mengatakan bahwa komitmen pengendalian gratifikasi ini merupakan *milestone* untuk menata organisasi.

"Tugas Menteri ESDM bukan memberantas korupsi, tapi institusi yang korup tidak pernah bisa *deliver* tugas-tugasnya. Tugas Menteri ESDM adalah mengelola energi dan sumber daya mineral supaya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Siapa yang memimpin institusi yang penuh masalah korupsi, tidak akan bisa menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat," tutur Menteri.

Menteri mengatakan bahwa jaman berubah. Hal yang dulu terlihat *trendy* bisa menjadi ketinggalan jaman di masa berikutnya. Ia pun berkisah tentang *apartheid* (sistem pemisahan ras yang

diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan di awal abad 20 -*red*) dan perbudakan yang pernah menjadi bagian hidup masyarakat di Amerika.

"Dulu saat *apartheid* masih berlaku di Afrika Selatan, yang tidak menjalankan dianggap kurang *trendy*. Semua orang ingin dilihat sebagai orang masa kini dan ingin diterima masyarakat. Tidak melakukan hal tersebut berarti anomali dalam masyarakat," Menteri memulai ceritanya. Ia kemudian melanjutkan bahwa ketika jaman telah berganti, ketika Nelson Mandela menjadi presiden di Afrika Selatan, seketika *apartheid* dianggap ketinggalan jaman. Orang-orang kemudian ingin diasosiasikan sebagai orang baru yang anti-*apartheid* dan anti perbudakan.

"Suatu ketika korupsi akan seperti itu. Korupsi akan menjadi masa lalu, menjadi sesuatu yang dihinakan seperti

kita sekarang memandang perbudakan dan *apartheid*," Menteri menyatakan keyakinannya. Ia melanjutkan bahwa suatu ketika orang-orang yang berpikir bahwa kalau tidak korupsi tidak *trendy*, kalau jujur jadi omongan, dan kalau tidak 'main-main' dianggap anomali, pasti akan berubah.

"Pada satu titik, entah kapan – saya rasa dekat – akan terjadi pembalikan. Praktek-praktek begitu akan menjadi masa lalu. Keinginan untuk menjadi orang bersih akan menjadi tren dimana-mana," tambah Menteri. Menteri mengajak semua untuk bersiap-siap menjadi manusia yang baru. Ia yakin bahwa sekarang sedang ada perubahan yang fundamental demi kebaikan bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga meluncurkan *Whistleblowing System Online*. Menteri menyampaikan bahwa ini adalah sistem dimana seluruh *stakeholder* terutama pegawai ESDM bisa melaporkan apa saja yang diperkirakan menyimpang dan terutama berpotensi ke tindak pidana korupsi. Menteri berharap mendapat dukungan dari masyarakat dan KPK agar program ini berjalan lancar. Pimpinan KPK Zulkarnain mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pengendalian gratifikasi serta peluncuran *Whistleblowing System Online*. Selain penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi antara Menteri ESDM dengan pimpinan KPK, dalam acara tersebut juga ada penyerahan *drop box* laporan gratifikasi oleh pimpinan KPK kepada Menteri ESDM. (AMH)

Dirjen Ketenagalistrikan Pimpin Rakor dengan Kadis ESDM Provinsi Se-Indonesia

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc mengundang seluruh Kepala Dinas ESDM Provinsi se-Indonesia untuk duduk bersama dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta pada Selasa (10/3). Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan peran Pusat dan Daerah di sektor ketenagalistrikan, khususnya pasca diberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dirjen Ketenagalistrikan yang didampingi pejabat Eselon II Ditjen Ketenagalistrikan membuka dan memimpin sendiri jalannya rakor ini. Hadir pula perwakilan dari Itjen KESDM, Biro Perencanaan KESDM, Bappenas, dan PT PLN (Persero). Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai implikasi dalam segala bidang. Salah satu hal yang mengalami perubahan adalah sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya sub sektor Ketenagalistrikan.

Pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, khususnya pada Sub Bidang Ketenagalistrikan telah dijelaskan

pembagian kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya. Pembagian kewenangan tersebut antara lain yang berkaitan dengan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik, penerbitan izin operasi, penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa tenaga listrik, penerbitan izin usaha penunjang tenaga listrik, serta penyediaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur ketenagalistrikan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Menurut Jarman, dengan diberlakukannya UU Pemerintah Daerah yang baru ini, banyak kewenangan dari Kabupaten/Kota ditarik ke Provinsi. Untuk itu, koordinasi ini sangat penting untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Jarman mempersilakan Direktur pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktur Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan, serta Direktur Teknik dan Lingkungan ketenagalistrikan untuk mempresentasikan beberapa program dan kewenangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam presentasinya, Direktur P e m b i n a a n P e n g u s a h a a n Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menyampaikan b e b e r a p a k e w e n a n g a n Pemerintah Pusat dan Daerah di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Beberapa k e w e n a n g a n tersebut antara

lain terkait penetapan wilayah usaha, rekomendasi dari pemerintah daerah terkait penetapan wilayah usaha, izin jual beli tenaga listrik lintas negara, izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPL), izin operasi (IO), penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, serta persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono juga mempresentasikan kebijakan keselamatan ketenagalistrikan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Agoes berpesan agar Pemda Provinsi mulai dapat menginventarisir izin usaha penyediaan, izin operasi dan sertifikat laik operasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota. Selain itu Pemda Provinsi diharapkan dapat menyusun peraturan daerah atau peraturan gubernur terkait kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan.

Agoes juga meminta Pemerintah Provinsi untuk memberikan pelayanan sesuai kewenangan Pemda Provinsi, antara lain izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPL), izin operasi (IO), izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL), serta izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika (IPJ Telematika). Pemerintah Provinsi juga diharapkan memberikan pelayanan terkait penerbitan sertifikat laik operasi dan/atau pemberian nomor register sesuai kewenangan dalam pemberian izin, serta memberikan rekomendasi untuk memperoleh wilayah usaha dari Menteri. Agoes juga berpesan agar pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan dalam pemberian izin. (PSJ)



Rakor DJK dengan Kadis ESDM Provinsi se-Indonesia bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung DJK



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah) pada Rakor Lides (29/4) di Bekasi menyatakan komitmen pemerintah agar penduduk di daerah terpencil bisa tetap terlistriki.

Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakor Lides Seluruh Indonesia

Tantangan terbesar listrik pedesaan (lides) ada pada daerah *remote* terutama pulau terluar. Sistem pembangkit hibrid yang memanfaatkan energi baru terbarukan di daerah setempat yang dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat menjadi alternatif untuk melistriki daerah-daerah tersebut. Tujuan utama dikembangkannya sistem hibrid adalah untuk menjamin suplai sumber energi primer pada pembangkit, sehingga produksi listrik juga terjamin. Dengan sistem hibrid ini pula maka sistem pembangkit akan menjadi lebih efisien.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc. saat membuka rapat koordinasi perencanaan lides seluruh Indonesia di Bekasi (29/4). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala dinas ESDM tingkat provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili, pejabat pembuat komitmen (P2K) satuan kerja lides, direksi PLN, serta pejabat ESDM dan kementerian terkait.

Dirjen menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini perlu dilakukan supaya ada sinergi antara PLN, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi tercapainya target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019. Target rasio elektrifikasi hingga akhir 2014 baru mencapai 84,35%. Artinya, masih ada 15,7% atau sekitar 10 juta kepala keluarga yang belum dapat menikmati listrik.

"Menteri ESDM sudah membuat surat untuk PLN bahwa daerah-daerah *remote*

dan perbatasan bisa memakai PLTD. Dengan demikian perencanaannya bisa saja tidak hanya jaringan tetapi juga pembangkit diesel skala kecil, misal 500 KW ke bawah. Nanti tujuan akhirnya adalah PLTD skala kecil ini akan dihibrid dengan energi baru di daerah setempat," ujar Dirjen.

Dirjen mencontohkan pulau-pulau terluar di Maluku yang meskipun memakai pembangkit listrik bertenaga diesel, namun solarnya tidak bisa dikirim setiap saat karena terkendala



Salah seorang peserta bertanya dalam sesi tanya jawab

ombak besar. Kalau PLTD di pulau-pulau tersebut dihibrid dengan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), maka PLTD hanya disiapkan agar sistemnya stabil selama 24 jam. Sistem hibrid sudah dikembangkan di Morotai, Bunaken, dan Miangas sehingga ketiga daerah tersebut sudah dapat menikmati listrik 24 jam.

Dalam rapat disampaikan juga bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit akan dikurangi secara bertahap sehingga pada tahun 2019 porsi BBM mendekati di bawah 2%. Porsi ini adalah untuk pemakaian diesel di pulau-pulau terpencil.

"Kita bisa mengusulkan diesel-diesel kecil di bawah 1 MW atau 500 KW untuk pulau-pulau terluar. Ada satu kecamatan yang terdiri dari 3-4 desa, dengan penduduk 1000 hingga 2000 kepala keluarga. Pakai diesel 500 KW saya rasa sudah cukup," lanjut Dirjen.

Dirjen menegaskan komitmen pemerintah agar penduduk di daerah terpencil bisa tetap terlistriki. Program instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan juga tetap dijalankan.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dirjen mengatakan orang-orang dari pemda kabupaten banyak yang menanyakan dampaknya terhadap lisdes. Selama ini pemda kabupaten memasang jaringan lisdes lalu dioperasikan oleh PLN. Namun di Undang-Undang tersebut, hal itu hanya bisa disalurkan dengan provinsi. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai hal tersebut.

"Secara Undang-Undang, tugas pemerintah pusat dan pemerintah

daerah adalah untuk melistriki daerah tertinggal, masyarakat tidak mampu, daerah perbatasan maupun untuk memperluas daerah listrik. Perlu dilakukan penganggaran melalui APBN atau APBD. Di Sulawesi Tenggara, pemdanya membangun jaringan untuk menghubungkan pulau utama dengan pulau-pulau di dekatnya. Cara seperti itu sangat membantu perluasan jaringan lisdes. Prinsipnya, asetnya milik pemda namun dioperasikan oleh PLN. Untuk dioperasikan, jaringan yang dibangun pemda harus lulus Sertifikat Laik Operasi (SLO). Kalau sudah lulus SLO, sudah bisa dioperasikan oleh PLN," jelas Dirjen.

Koordinasi Kementerian ESDM dengan dinas ESDM provinsi maupun PLN perlu segera ditingkatkan terutama dalam hal perencanaan. Koordinasi seperti ini penting agar dapat mensinergikan dan mengoptimalkan dana yang ada untuk lisdes. Dirjen berujar jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Indonesia bisa kembali mundur ke masa sebelum 2011. Saat itu, kecepatan rasio elektrifikasi hanya 1%. Di awal 2011, saat pertama kali menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman mengungkapkan rasio elektrifikasi Indonesia hanya 67,15%. Lalu dalam tempo empat tahun, rasio elektrifikasi

meningkat menjadi 84,35%. Dirjen mengatakan hal seperti ini perlu terus dikawal.

Terobosan dan ide-ide untuk percepatan lisdes sangat diperlukan. Dirjen kembali memberi contoh, dulu masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dikenakan biaya 4 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah untuk menyambung instalasi listrik 450 va. Namun setelah bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk PLN, AKLI, dan Konsuil, terbitlah peraturan yang mengatur bahwa pemasangan instalasi listrik 450-900 va untuk gambar standar tidak perlu ada biaya gambar. Dalam prosesnya, masyarakat juga diberi tahu alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Sekarang untuk pemasangan 450 va diperlukan biaya tidak lebih dari 2 juta rupiah; rata-rata sebesar 1,8 juta rupiah.

Dirjen juga mengungkapkan data World Bank telah menunjukkan bahwa tingkat kemudahan untuk mendapatkan listrik di Indonesia sudah lebih baik. Salah satu kriterianya adalah karena prosedur yang lebih singkat dan pemotongan biaya-biaya yang tidak perlu. Dirjen berharap rapat koordinasi seperti ini dapat memunculkan terobosan untuk mempercepat listrik pedesaan. (AMH)



Peserta berasal dari Dinas ESDM tingkat provinsi seluruh Indonesia

Investor Jepang Tertarik Program 35.000 MW



Atas: Pertemuan DJK dengan investor dari Jepang dikoordinir oleh METI
Bawah: Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyambut salah seorang investor

Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc. menerima kunjungan investor dari Jepang untuk membahas Program 35.000 MW. Pertemuan yang bertempat di Gedung DJK pada Rabu (3/6) ini dikoordinir oleh *Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)* Jepang dan diikuti oleh sembilan perusahaan Jepang yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia di sektor ketenagalistrikan.

Program 35.000 MW adalah program yang digagas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-6.5% per tahun, peningkatan ketersediaan listrik diproyeksikan 8-9% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan datang, setiap tahun Indonesia harus bisa menyediakan tambahan daya listrik 7.000 MW atau 35.000 MW selama lima tahun mendatang. Pemerintah menargetkan pada 2020 elektrifikasi nasional mencapai 99%.

Peranan *Independent Power Producer (IPP)* akan lebih besar daripada PLN dalam Program 35.000 MW. PLN mendapat alokasi 10.000 MW

sementara 25.000 MW akan dikerjakan oleh IPP. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi investor untuk masuk ke dalam program ini dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan investor dari Jepang, muncul setidaknya empat bahasan terkait *land acquisition* (pembebasan lahan), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perijinan, dan sertifikasi profesi. Sehubungan dengan *land acquisition*, Dirjen Jarman menegaskan jika regulasi yang baru dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

Kewajiban perusahaan untuk memenuhi tingkatan kandungan lokal atau TKDN juga menjadi topik yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Pengusaha meminta kebijakan tersebut di pertimbangkan kembali karena mereka merasa kesulitan dalam mencari rekanan lokal yang

sesuai dengan teknologi mereka yang advanced. Menanggapi hal tersebut, Dirjen menyatakan bahwa TKDN merupakan domain Kementerian Perindustrian. Namun Dirjen akan menampung masukan tersebut dan mendiskusikannya pada tingkatan yang lebih tinggi.

Salah satu investor juga menyoroti pengalamannya saat mengurus perijinan di masa lalu yang dianggap tidak jelas. Dirjen Jarman mengungkapkan bahwa di era pemerintahan yang baru ini, perijinan investasi termasuk di sektor ketenagalistrikan dibuat lebih mudah dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Dengan PTSP, waktu untuk mengurus perijinan dapat dipangkas sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan alurnya pun lebih jelas. Sertifikasi profesi juga dibahas dalam rapat ini. Dirjen menjelaskan tenaga ahli sektor ketenagalistrikan harus mempunyai sertifikat profesi yang memenuhi standar.

Dalam sambutan penutupnya, Toshihiko Fujii dari METI mengucapkan terima kasih pada DJK atas kesempatan yang diberikan. Dirjen Jarman juga menyambut baik dan mengapresiasi keinginan pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. (AMH)



Delegasi Pemerintah Mesir Kunjungi Kantor Ditjen Ketenagalistrikan

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Senin (27/4) menerima Kunjungan Delegasi Pemerintah Mesir di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta. Kunjungan tersebut difasilitasi oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Munir Ahmad didampingi oleh sejumlah pejabat Ditjen Ketenagalistrikan di antaranya Kasubdit Penyiapan Program Ketenagalistrikan Wanhar, Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan Benhur, dan Kasubdit Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik Husni Syarifuddin.

Delegasi Mesir dipimpin oleh Dr. Mohamed Mousa Ali Omran, *First undersecretary – State for Research, Planning and Authorities Follow-UP, Ministry of Electricity and Renewable Energy*, dan pejabat dari *Egyptian Electricity Holding Company* dan *Egyptian Environmental Affairs*

Agency.

Dalam kesempatan tersebut, Munir Ahmad menyambut baik kedatangan delegasi Mesir dan memahami bahwa Pemerintah Mesir sedang mempertimbangkan untuk menggunakan batubara sebagai sumber energi alternatif selain minyak bumi, gas dan air yang telah digunakan di Mesir; dan menyambut baik minat Pemerintah Mesir untuk belajar dari pengalaman Indonesia menggunakan dan memanfaatkan Batubara sebagai sumber energi primer, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi telah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,7% meningkat dari 5,1% di tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh ketersediaan tenaga listrik yang handal sebagai tulang punggungnya.

Indonesia sebagai salah satu produsen batubara memiliki keuntungan karena dapat langsung menggunakan sumber daya tersebut untuk pembangkitan tenaga listrik, meskipun juga menghadapi tantangan lingkungan. Hal ini merupakan tantangan yang terus menerus ada, dan Indonesia meyakini hal tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi. Saat ini, Indonesia sedang bekerjasama dengan investor Jepang memperkenalkan *Clean-Coal Technology Ultra-Super Critical* pada PLTU Batang 2x1000MW di Jawa Tengah.

Proyek ini merupakan proyek penting dan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan energi khususnya di Jawa, Madura dan Bali. Pemanfaatan batubara tidak hanya mempengaruhi lingkungan, namun selayaknya batubara sebagai bahan bakar fosil, maka jumlahnya



Foto bersama antara Delegasi Mesir dengan perwakilan DJK dan JICA



Pertukaran cinderamata antara Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Ahmad (kiri) dan perwakilan Delegasi Mesir (kanan)

terbatas dan akan segera habis karena eksploitasi; sehingga Indonesia juga telah memanfaatkan dan terus mengembangkan energi terbarukan.

Selanjutnya Wanhar memaparkan kondisi sistem ketenagalistrikan Indonesia yang saat ini telah mencapai 53,3GW, dimana 70%nya merupakan kapasitas pembangkitan oleh PT. PLN (Persero), diikuti oleh IPP sekitar 20%. Dan melalui *pie-chart*, terlihat batubara mendominasi bauran energi sampai 52,8%, diikuti oleh gas 24,2% dan BBM 11,7%; sementara energi terbarukan masih berperan kecil sekitar 11% yang terdiri dari air dan panas bumi.

Pengalaman Indonesia melaksanakan *Fast Track Program* tahap I sejak tahun 2006 baru menghasilkan 7,4GW dari target 10GW yang diharapkan akan selesai medio 2016. Wanhar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik 35.000 MW hingga 5 (lima) tahun mendatang, dan saat ini sedang berlangsung. Dari 35GW tersebut, PLN berencana mengembangkan hanya 1/3 saja, sementara 2/3 diharapkan dari IPP.

Wanhar juga menambahkan hambatan

yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di antaranya keterbatasan pembiayaan, alih fungsi lahan, proses perijinan, tumpang tindihnya fungsi lahan, permasalahan manajemen dan teknis, dan tendensi pihak peminjam meminta jaminan pemerintah untuk pendanaan proyek IPP. Untuk itu sinergi antar lembaga negara perlu dilakukan agar saling mendukung satu sama lain.

Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan untuk mempercepat program pengembangan 35GW tersebut, di antaranya dengan menerbitkan UU No. 2/2012 yang mengatur tentang

alih fungsi lahan, Permen ESDM No. 3/2015 tentang negosiasi harga dan mekanisme pengadaan IPP, dan lainnya; terkhusus masuknya Uji Tuntas (*Due Diligence*) sebagai prasyarat (yang sebelumnya belum pernah diberlakukan) IPP mengembangkan pembangkitan tenaga listrik.

Selanjutnya dalam sesi diskusi, perwakilan Pemerintah Mesir dan JICA menanyakan sejumlah hal terkait kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ketenagalistrikan khususnya pemanfaatan batubara. Sejumlah pertanyaan terkait institusi yang berkembang juga ke arah perlindungan lingkungan dan perhitungan Capex (*Capital Expenditure*).

Seusai kunjungan ke Ditjen Ketenagalistrikan, Delegasi Mesir dan JICA akan berkunjung ke PT. PLN (Persero) untuk mengetahui lebih detail operasional PLN sebagai BUMN Ketenagalistrikan di Indonesia. Besok delegasi akan mengunjungi PLTU Suralaya untuk memperoleh gambaran operasional pembangkit berbahan bakar batubara. Di akhir pertemuan dilakukan tukar cinderamata antara kedua pimpinan delegasi dan foto bersama antar delegasi. (RBS)



Kasubdit Penyiapan Program Tenaga Listrik Wanhar (tengah) memaparkan kondisi sistem ketenagalistrikan Indonesia.

Wapres : Listrik Infrastruktur Tak Tergantikan



Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa listrik adalah infrastruktur yang tidak tergantikan. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak membutuhkan listrik dalam menjalani kehidupannya.

"Infrastruktur apapun, termasuk jalan, listrik dan telekomunikasi, dari semua infrastruktur itu yang tidak tergantikan itu listrik," kata Wapres saat membuka Munas VI Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya jika infrastruktur lain mengalami kerusakan, masih ada penggantinya. "Jika jalan rusak, masih bisa digantikan kapal laut, begitu pun kapal laut yang rusak masih bisa digantikan dengan pesawat," ujarnya memberi contoh.

"Kalau listrik tidak ada, tidak ada penerangan jalan, *handphone* tidak nyala, komputer tidak nyala," tambahnya. Menurut Wapres,

penggunaan listrik yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara maju.

Karena merupakan infrastruktur yang tak tergantikan, menurutnya Indonesia membutuhkan cadangan pasokan listrik yang cukup. JK mengatakan bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan listrik rata-rata sebesar 10 persen dari total kapasitas listrik yang ada. Menurutnya cadangan yang paling normal untuk listrik adalah sebesar 30 persen.

"Maksudnya kalau cadangan 10 persen itu ada mesin rusak satu diperbaiki ya sudah gelap lagi. Minimal itu 30 persen; cadangan itu yang baik itu 30 persen," ungkapnya. Pemerintah menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan menambah pasokan listrik 54.000 MW sehingga cadangannya mencapai 30 persen. Pemerintah optimis target 35.000 MW dalam lima tahun ke depan dapat tercapai. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan

untuk merealisasikan program tersebut antara lain dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengurus izin pembangunan pembangkit listrik di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menerbitkan regulasi-regulasi terkait harga patokan jual beli listrik. Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta swasta untuk ikut dalam pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah pembebasan tanah untuk proyek pembangkit listrik, JK mengatakan bahwa PLN dan swasta jangan pelit kepada rakyat. "Kita sering berdebat soal ganti rugi lahan. Padahal untuk membebaskan lahan hanya sekitar 0,5 persen dari total investasi. Jangan pelit kepada rakyat," tegasnya. Menurut Wapres, rakyat harus diberi harga yang baik untuk tanah yang dipakai. "Tapi, rakyat jangan semena-mena, harga tanah Rp 100.000 minta ganti rugi Rp 3 juta," imbuhnya. (PSJ)



Atas: Wapres Jusuf Kalla meminta swasta untuk ikut andil dalam Program 35.000 MW

Bawah: Pemukulan gong oleh Wapres Jusuf Kalla saat membuka Munas ke-VI MKI di Jakarta

Pemerintah Atur Usaha Penyediaan Listrik Rusun dan Apartemen

Pertumbuhan rumah susun dan apartemen di kota-kota besar semakin meningkat tajam. Hal tersebut meninggalkan persoalan di sektor ketenagalistrikan. Untuk itu Kamis (23/4) lalu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengumpulkan pengelola apartemen dan pemerintah daerah dalam *coffee morning* Sosialisasi Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Rumah Susun dan Apartemen.

Acara yang digelar di Auditorium Ditjen Ketenagalistrikan ini berhasil menyatukan suara antar pemerintah, PT PLN, dan pengelola apartemen untuk melindungi konsumen listrik.

Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra, selama ini banyak penghuni apartemen mengeluhkan mahalnya tagihan listrik yang perlu dibayar kepada pengelola (pengembang apartemen). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya saling tuding antara penghuni dan pengelola apartemen. Pertemuan ini juga mengundang Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun sebagai pembicara sehingga diharapkan antara konsumen listrik, pengembang, dan PT PLN (Persero) satu suara.

Pengelola apartemen yang meneruskan seluruh biaya terkait penyaluran listrik kepada tenant, termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang

digunakan bersama, tanpa memperoleh margin keuntungan, maka pengelola dikategorikan tidak menjual listrik. Sedangkan pengelola apartemen yang meneruskan seluruh biaya terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama dengan tambahan margin keuntungan tertentu, maka pengelola



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dalam Coffee Morning di DJK mengenai pengaturan usaha penyediaan listrik di rusun dan apartemen

dikategorikan menjual listrik, dan karenanya harus memiliki penetapan wilayah usaha dan memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dimana tarifnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

"Sebagai penerbit IUPTL, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif listrik untuk konsumen, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menetapkan sanksi administratif kepada pemegang izin," tutur Satya.

Ia menambahkan, biaya listrik yang dibebankan kepada para tenant atau penghuni rumah susun bukan hanya untuk listrik yang dipakainya saja atau kelas rumah tangga. Biaya listrik lain seperti perawatan, penerangan umum, lift, sampai sarana dan prasarana umum lainnya pun dibebankan kepada penghuni.

Menurut Satya, Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait perizinan ketenagalistrikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur). Untuk itu pengelola rusun dan apartemen yang akan mengurus IUPTL dapat menghubungi Dinas ESDM Provinsi setempat. Sebagai penerbit IUPTL, Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menetapkan sanksi administratif kepada pemegang IUPTL yang ditetapkannya. Untuk itu kebijakan yang disosialisasikan dalam *coffee morning* ini penting untuk diketahui pemerintah daerah. (PSJ)

Menteri ESDM Lantik Pejabat Eselon I dan II

Menteri ESDM Sudirman Said pada Kamis (7/5) pagi melantik sejumlah pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM. Menteri melantik Ir. Jarman M.Sc sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Selain itu, Menteri juga melantik Prof Dr. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja, M.Sc sebagai Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM sebagai Dirjen Mineral Batubara, Ir. Rida Mulyana M.Sc sebagai Dirjen EBTKE, serta Satry Nugraha SH, LLM sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Selain mengambil sumpah janji dari lima Pejabat Eselon I, Menteri juga melantik Pejabat Eselon II dimana 22 orang pejabat merupakan hasil rotasi dan 12 orang merupakan hasil promosi. Di Ditjen Ketenagalistrikan, Menteri ESDM melantik Sujatmiko sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Alihuddin Sitompul sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, serta Munir Ahmad sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Dari pejabat-pejabat eselon II yang dilantik tersebut, Menteri melantik dua orang dari Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKPM). "Dua orang berasal dari luar Kementerian ESDM," tutur Sudirman Said. Pejabat-pejabat yang dilantik ini sebagian berasal dari seleksi atau lelang jabatan yang dilaksanakan oleh panitia seleksi independen.

Menteri ESDM dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama Kementerian ESDM melakukan penyegaran. Ia berpesan kepada semua pejabat agar melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik serta menjaga kehormatan diri.

"Penghormatan bisa menjadi kehormatan jika menjaga betul kehormatan diri kita," jelas Menteri ESDM. Menjaga komunikasi dan merapatkan barisan merupakan salah satu poin penting yang disampaikan Sudirman Said dalam kesempatan tersebut. Selain itu Menteri ESDM berpesan bahwa yang paling penting adalah langkah apa yang harus kita lakukan ke depan.

Di bidang kelistrikan, menurut

Menteri yang paling penting adalah mensukseskan program 35.000 MW. Menurutnya, tidak boleh pembangunan tersebut lewat begitu saja hanya meninggalkan mesin tanpa meningkatkan kapasitas nasional.

"Industri penunjang kelistrikan mesti dibangun, saya sudah kerjasama dengan Menteri Perindustrian, Kepala BPPPT dan Menko Perekonomian," tegas Menteri. Menteri berkomitmen untuk terus memberi perhatian pada local content baik dari produk maupun tenaga kerja.

Ke depan, Menteri ESDM mengharapkan inovasi dan kedisiplinan dari para pemimpin yang dilantik. Menteri juga berpesan untuk menjaga barisan agar tetap bersatu dan melaporkan kepada atasannya apabila ada tekanan dari manapun juga. "Semoga kita bisa menyerahkan jiwa raga kita kepada republik, semata-mata melayani masyarakat," ungkapnya. "Selamat kepada yang dilantik, juga kepada pasangan dan keluarga," pungkas Menteri ESDM. (PSJ)

Foto bersama Menteri ESDM dan pejabat Eselon I dan II yang baru dilantik di Kementerian ESDM

35 Asesor Perdana Bidang Ketenagalistrikan Dapatkan SK Dirjen

Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc pada Kamis (4/6) mengangkat 35 asesor perdana untuk melakukan sertifikasi asesor ketenagalistrikan. Pengangkatan tersebut ditandai dengan penyerahan SK yang langsung disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan di Auditorium Samaun Samadikun, Kantor Ditjen Ketenagalistrikan.

Dengan terbitnya SK Dirjen Ketenagalistrikan nomor 198K/73/DJL.1/2015 tentang asesor perdana di Bidang Ketenagalistrikan tersebut, 35 orang tersebut telah resmi dapat melakukan uji kompetensi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu 13 Mei 2015.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat (6), setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sesuai pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 19 PP No. 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, sertifikat kompetensi tenaga teknik diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi oleh Menteri. Menurut Jarman, saat ini belum terdapat asesor ketenagalistrikan yang memiliki sertifikat kompetensi dalam melakukan uji kompetensi tenaga teknik sehingga perlu diangkat asesor perdana di bidang ketenagalistrikan.

“Dengan adanya asesor perdana tersebut, LSK yang belum terakreditasi untuk subbidang asesor ketenagalistrikan, agar segera mengajukan permohonan penunjukan dengan mencantumkan asesor perdana tersebut sesuai dengan bidangnya,” ungkap Jarman.

Bidang-bidang tersebut antara lain transmisi, distribusi, dan instalasi pemanfaatan. Sedangkan untuk LSK yang telah memiliki akreditasi sub bidang asesor ketenagalistrikan, menurut Jarman dapat menggunakan asesor perdana yang tercantum dalam SK Dirjen tersebut untuk melakukan uji kompetensi.

Dirjen Ketenagalistrikan berharap bahwa dalam satu tahun masa kerja asesor perdana, dapat melakukan uji kompetensi terhadap calon-calon asesor ketenagalistrikan yang memiliki sertifikat kompetensi. (PSJ)



Suasana pengangkatan 35 asesor perdana untuk melakukan sertifikasi asesor ketenagalistrikan. Acara ini bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, DJK.

Dirjen Ketenagalistrikan Buka Pertemuan Kedua Penyusunan ASEAN Energy Outlook



Pertemuan Kedua penyusunan ASEAN Energy Outlook ke-4 bertempat di The Parklane Hotel, Jakarta

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman selaku *Senior Officer of Energy (SOE) Leader* Indonesia pada Senin (11/5) menyampaikan *Welcome Remark* pada acara the *2nd Working Group Meeting on The Development of the 4th ASEAN Energy Outlook*. Acara yang digelar di The Parklane Hotel Jakarta ini diselenggarakan oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) bekerjasama dengan Fraunhofer Institute for System and Innovation Research ISI, Jerman.

Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Buku ASEAN Energy Outlook (AEO) ke-4, dimana pertemuan pertama diselenggarakan di tempat yang sama pada Februari 2015 lalu.

Dalam sambutannya Jarman mewakili pemerintah Indonesia menyambut baik kegiatan diskusi kelompok untuk menyusun *ASEAN Energy Outlook* yang keempat dan menyiapkan ASEAN *Minister of Energy Meeting* (AMEM)

ke-33 tahun ini. Menurut Jarman, negara-negara ASEAN saat ini terus berkembang, dimana salah satunya adalah perkembangan yang signifikan di sektor energi.

Untuk itu pertemuan ini diharapkan dapat menjadi tempat berbagi ilmu, metodologi, modul dan skenario untuk menyusun *energy outlook*. "Saya berharap *energy outlook* ini dapat meningkatkan sektor energi di regional ASEAN," tutur Jarman.

Setelah sambutan dari Dirjen Ketenagalistrikan, kata sambutan disampaikan oleh sambutan oleh Dr Rudolf Frau, *Director for Energy Program ASEAN*, Fraunhofer Institute for System and Innovation Research ISI, Jerman. Setelah itu sambutan disampaikan oleh Sekretaris Direktur ACE Sanjayan Velautham.

Berdasarkan laporan dari Sanjayan, ACE diamanatkan oleh AMEM untuk

menyusun dan mengembangkan *ASEAN Energy Outlook* ke-4 yang rencananya akan diluncurkan saat pertemuan AMEM ke 33 yang direncanakan pada Bulan Oktober 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

ASEAN Energy Outlook ke-4 direncanakan akan terdiri dari tiga skenario, yaitu: *Business as Usual*, *New Policy Scenario* dan *Alternative Projection Scenario*.

Business As Usual merupakan pemanfaatan energi dalam situasi yang normal; *New Policy Scenario* meliputi target resmi Energi Terbarukan (*Renewable Energy*) dan Penghematan Energi (*Energy Efficiency*) masing-masing negara anggota ASEAN, sementara *Alternative Projection Scenario* fokus pada pencapaian pengurangan Intensitas Energi (*Energy Intensity*) ASEAN dengan target 20% dalam jangka menengah dan 40% sebagai target jangka panjang pada tahun 2025 dengan basis level tahun 2015.

Sanjayan menyampaikan bahwa ACE siap mengawal hingga *ASEAN Energy Outlook* keempat bisa tersusun dan memberi manfaat bagi regional ASEAN dan mitra ASEAN. (PSJ)

59 PNS DJK Diambil Sumpah Jabatan



Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc. mengambil sumpah jabatan 59 PNS dan menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada 12 pegawai dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada 7 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan (DJK). Acara ini berlangsung pada Kamis (30/4) bertempat di Auditorium Samaun Samadikun Gedung DJK, Jakarta.

Sumpah jabatan PNS ini dipandu oleh Dirjen dengan didampingi para rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing pegawai yang diambil sumpahnya. Ronggo Anugerah Putro Hartanto dan Ratih Wahyu Wijayanti menjadi perwakilan yang menandatangani berita acara pengangkatan PNS sekaligus menerima SK PNS yang diberikan oleh Dirjen Jarman dan disaksikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Asep Rachman S. Pengangkatan PNS ini didasarkan pada Kepmen ESDM Nomor 2057-2117 K/73/MEM/2015 yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015.

Bagi PNS yang baru diangkat, Dirjen berpesan supaya mereka dapat bekerja keras, profesional, dan berintegritas

dalam melaksanakan tugas.

"DJK adalah instansi yang bertanggung jawab sebagai regulator di sektor ketenagalistrikan. Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Saudara sebagai PNS yang baru diambil sumpahnya

diharapkan dapat memberikan sumbangsih sehingga kinerja DJK dapat ditingkatkan," ujar Dirjen.

Pada acara yang sama, Dirjen juga memberikan Satyalancana Karya Satya pada total 19 pegawai yang telah mengabdikan selama 10 dan 20 tahun. Dirjen Jarman sendiri mendapatkan tanda kehormatan tersebut atas pengabdian selama 30 tahun.

Pemberian Satyalancana Karya Satya untuk pegawai ini didasarkan pada Keppres Nomor 70/TK/2014 tanggal

11 Agustus 2014. Dasar hukum Satyalancana Karya Satya adalah PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Satyalancana Karya Satya diberikan sebagai bentuk apresiasi negara pada pegawai dan bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja PNS sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS yang lain.

Dirjen mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan pada para penerima Satyalancana Karya Satya. Dirjen berharap pemberian tanda kehormatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai dalam mengemban tugas melayani masyarakat.

"Mari kita bersama-sama memberikan pelayanan bagi bangsa dan negara dengan mempermudah segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat, serta terus melakukan penegakan peraturan perundang-undangan," pungkaskan Dirjen. (AMH)



Pemberian SK PNS oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman kepada PNS yang telah diambil sumpahnya

Dirjen Ketenagalistrikan Sambut 28 CPNS Baru

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc pada hari Selasa (5/5) menyambut 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam kesempatan tersebut Dirjen didampingi oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Ahmad dan sejumlah pejabat Eselon III.

Dalam arahnya Dirjen mengingatkan bahwa fungsi dari Ditjen Ketenagalistrikan adalah fungsi kebijakan dan regulasi. Di bidang kebijakan, pemerintah merumuskan antara lain Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional (RUKN) dan kebijakan tarif listrik.

Selain itu berbagai fungsi perizinan juga dilakukan oleh Ditjen ketenagalistrikan selain fungsi tambahan yaitu pembangunan sektor ketenagalistrikan. Dirjen berharap para pegawai baru ini bisa memberikan masukan kepada

atasan mengenai kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan memperkenalkan fungsi pengawasan pemerintah di sektor ketenagalistrikan seperti Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ia mengingatkan bahwa keselamatan ketenagalistrikan adalah faktor yang penting, untuk itu penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan seperti penanganan pencurian listrik selalu menjadi perhatian Ditjen Ketenagalistrikan.

Dirjen Ketenagalistrikan memotivasi pegawai baru agar memanfaatkan kesempatan untuk mengambil



Pemberian ucapan selamat kepada salah seorang CPNS

kesempatan belajar. "Banyak kesempatan untuk sekolah lanjut di sini," ungkap Jarman. Ia juga berharap agar para pegawai memanfaatkan semua kesempatan pendidikan dan pelatihan di luar. Selain itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), para pegawai baru ini diharapkan bisa bekerja di manapun berada.

"Saudara harus siap ditugaskan untuk bekerja di luar Ditjen Ketenagalistrikan," ujarnya.



28 CPNS berfoto bersama Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Ahmad.

Tahun 2015 ini Ditjen ketenagalistrikan menerima 28 pegawai hasil seleksi akhir tahun 2014. Berdasarkan laporan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Asep Rachman, para CPNS ini sudah mendapatkan pembekalan dari kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada hari Senin (4/5) lalu di Gedung Arsip ESDM Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Setelah pembekalan dari Dirjen Ketenagalistrikan, para CPNS ini menerima SK untuk segera bekerja di

Direktorat masing-masing. (PSJ)

Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok, untuk itu pelayanan ketenagalistrikan menjadi salah satu isu penting. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Subdit Perlindungan Konsumen Listrik menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Ratu Hotel Bidakara, Serang, Provinsi Banten pada tanggal 25 Mei 2015. Acara dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Perlindungan Konsumen Listrik Winsisma Wansyah mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Para narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Kasubdit Perlindungan Konsumen Listrik Winsisma Wansyah, Kasubdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik Djoko Widiyanto, Manajer Senior Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Awaluddin Hafid, Manajer Bidang Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Rahimuddin, serta Tulus Abadi selaku Pengurus Harian YLKI.

Dalam paparannya Winsisma menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen listrik dan kewajiban bagi PLN di bidang pelayanan ketenagalistrikan. PLN wajib untuk memberikan kompensasi sebesar 20% dari biaya beban bagi konsumen yang terkena lama atau jumlah pemadaman

listrik (lama gangguan dan jumlah gangguan) melebihi yang dijanjikan PLN, juga untuk indikator pinalti Tingkat Mutu Pelayanan yang lain, yaitu untuk indikator kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi rekening.



Dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan dibahas mengenai hak dan kewajiban konsumen listrik dan kewajiban bagi PLN di bidang pelayanan ketenagalistrikan

Lebih lanjut Winsisma memaparkan bahwa pada tahun 2014, PLN di Jawa Bali telah memberikan kompensasi sebesar Rp 2.150.469.385 untuk 118.684 konsumen, adapun untuk Distribusi Jawa Barat dan Banten sebesar Rp 644.739.167 untuk 21.751 konsumen.

Sementara itu, Djoko Widiyanto menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah terkait tarif dan subsidi listrik dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu. Ia menyampaikan bahwa subsidi listrik akan tetap ada, namun diprioritaskan

bagi konsumen tidak mampu, sementara tarif untuk konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap.

Dalam menerapkan tarif kepada konsumen PLN, Pemerintah harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat. Kasubdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik ini juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 terdapat 12 golongan tarif non subsidi yaitu R1 1300VA dan 2200VA, R2, R3, B2, B3, I3, I4, P1 6600VA ke atas, P2, P3 dan Layanan Khusus (L).

Untuk ke 12 golongan tarif tersebut, fluktuasi BPP karena faktor yang bersifat *uncontrollable* (kurs, inflasi, ICP) tidak dibebankan pada subsidi, namun dibebankan kepada pelanggan non subsidi melalui mekanisme *tariff adjustment*.

Narasumber dari PT PLN (Persero) Pusat, Awaluddin Hafid menyampaikan presentasi berjudul Layanan Tanpa Batas Transformasi Pelayanan PT PLN (Persero). Ia menjelaskan bahwa PLN melakukan transformasi menjadi layanan PLN tanpa batas ruang dan waktu dengan program-program *contact center 123* dan aplikasi terpusat, sehingga pelanggan tidak harus datang ke kantor PLN yang sifatnya pasti, tanpa gratifikasi, dan berstandar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Awaluddin menyatakan bahwa transformasi layanan ini telah menampakkan hasil dimana berdasarkan survey peringkat *Getting Electricity* PLN pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi peringkat 78 dari sebelumnya peringkat 101 pada tahun 2014.

Sementara itu narasumber dari PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rahimuddin, sebagai tuan rumah sosialisasi menjelaskan kebijakan PLN setempat. Hal penting yang menjadi catatan utama adalah bahwa Jawa Barat dan Banten berkontribusi 21.6% dari total pelanggan nasional atau sejumlah 12.455.084 pelanggan.

Sebagai narasumber penutup adalah Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Narasumber yang populer dan sering menjadi pembicara di media ini menyoroiti permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa yang menjadi catatan penting Tulus adalah adanya persoalan infrastruktur yang terlambat dan potret pelayanan pelanggan yang masih menyisakan beberapa permasalahan di lapangan. Tulus juga mempertanyakan mengenai kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi konsumen listrik.

Selain itu, pengamat ini mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik melalui program 35.000 MW. Sosialisasi tersebut diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi dengan peserta. (AM)

Inspektur Ketenagalistrikan Pastikan Ketersediaan Listrik Beberapa Sekolah di Provinsi DKI Jakarta

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menugaskan inspektur ketenagalistrikan untuk menginspeksi ketersediaan listrik beberapa sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dari Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait sekolah-sekolah yang belum mendapat aliran listrik. Beberapa sekolah yang diinspeksi berlokasi di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Inspeksi ketersediaan listrik beberapa sekolah di Provinsi DKI Jakarta tersebut merupakan gerak cepat Ditjen Ketenagalistrikan sebagai langkah pengumpulan dan verifikasi data. Enam belas inspektur ketenagalistrikan yang diturunkan mendapat tugas untuk memastikan ketersediaan listrik di sekolah-sekolah tersebut. Proses inspeksi sendiri akan berlangsung Selasa (24/3) hingga Rabu (25/3) dan dapat diperpanjang.

Seperti diberitakan Koran Sindo, Senin (2/3), Menteri ESDM Sudirman Said berkomitmen untuk memverifikasi serta menindaklanjuti informasi tentang sekolah-sekolah yang belum mendapatkan aliran listrik.

"Kami mendapat informasi penting

bahwa di bawah Kemendikbud masih banyak sekolah yang belum memperoleh sambungan listrik. Ini menjadi tanggung jawab besar Kementerian ESDM sebagai pengelola energi, karena itu selanjutnya kita akan memverifikasi secara terencana dan melakukan tindakan di lapangan supaya segera teratasi," kata Menteri ESDM Sudirman Said. (PSJ)

PELAKSANAAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KUALITAS LINGKUNGAN GLOBAL

Oleh : HS Bayu Anggoro

1. Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan dampak serta aspiratif dengan adat istiadat masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Seluruh *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan pembangunan terlibat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat setempat, pengusaha (investor), serta Pemerintah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi sumberdaya pembangunan yang memperhitungkan keuntungan dan manfaat untuk rakyat banyak.

Pembangunan perlu direncanakan secara baik dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para pengambil kebijakan perlu berhati-hati dalam menerapkan hasil kebijakannya, oleh karena itu sebelum kebijakan dilaksanakan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan berbagai aspek. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, dan kepercayaan yang dianutnya.

Pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotic (flora, fauna), dan *culture* (budaya, interaksi

antarmanusia). Kondisi kualitas lingkungan akan berkecenderungan terus menurun jika tidak diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada. Bencana banjir yang sering melanda di kota-kota besar saat ini merupakan salah satu contoh dampak pembangunan yang kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Lingkungan global menjadi semakin parah, *global warming* atau pemanasan global bukan menjadi isu lagi, tetapi sudah sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat dunia. Iklim ekstrim sering terjadi di berbagai kawasan di belahan dunia ini. Emisi gas karbon sulit dikendalikan, lapisan ozon menipis bahkan sudah ada yang bocor (hasil penyelidikan NASA, 6 November 2008 diperoleh informasi bahwa lubang ozon di atas kutub selatan seluas 26,88 km²).

2. Konsep dan Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi dan penggunaan sumber alam yang dapat habis (tidak terbarukan) pada tingkat dimana kebutuhan generasi mendatang tetap akan terpenuhi.

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi "kegagalan" pembangunan, dimana proses yang terjadi bersifat *top-down* (arus informasi yang terjadi hanya satu arah dari atas ke bawah) dan jika ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi proses pembangunan yang terjadi ternyata tidak berkelanjutan. Pelaksanaan konsep ini diperkuat lagi dengan kesepakatan para pemimpin bangsa yang dinyatakan dalam hasil-hasil negosiasi internasional, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi tahun 1992, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002.

Pada tahun 1980, istilah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, menjadi isu aktual pembangunan yang penting di seluruh Negara di dunia ini setelah diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN),

dan *World Wide Fund for Nature* (WWF). Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya. Menghasilkan terbentuknya Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development* - WCED).

Kriteria pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada empat aspek umum pembangunan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi. Sebuah inisiatif negara-negara selatan dan negara utara dalam sebuah kerja sama aplikasi *Clean Development Mechanism* (CDM) menghasilkan sebuah kriteria dan indikator untuk menilai kontribusi proyek CDM terhadap pembangunan berkelanjutan.

Metode *Social Security Number* (SSN) melihat pembangunan berkelanjutan dari empat sisi yaitu, sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi dan tercermin dalam indikator-indikator berikut ini (<http://www.cdm.or.id>) :

- a. Kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal;
- b. Kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam;
- c. Kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja;
- d. Kontribusi terhadap keberlanjutan neraca pembayaran;
- e. Kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro;
- f. Efektifitas biaya;
- g. Kontribusi terhadap kemandirian teknis.

Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. Kebutuhan dasar sebagian besar penduduk di bumi ini seperti pangan, sandang, papan, pekerjaan perlu terpenuhi, disamping mempunyai cita-cita akan kehidupan yang lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas

bukan absolute akan tetapi batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin pemerataan dan keadilan sosial;
- b. Menghargai keanekaragaman (*diversity*);
- c. Menggunakan pendekatan *integrative*;
- d. Meminta perspektif jangka panjang.

Di dalam pembangunan berkelanjutan terkandung dua gagasan penting, yaitu gagasan kebutuhan yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutan kehidupan manusia serta gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan masa depan. Sehingga untuk memenuhi dua gagasan tersebut diperlukan syarat-syarat untuk pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan Ekologis;
- b. Keberlanjutan Ekonomi;
- c. Keberlanjutan Sosial dan Budaya;
- d. Keberlanjutan Politik;
- e. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Pembangunan berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian agar suatu daerah dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada. Masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Menghadapi tantangan kualitas lingkungan global saat ini memerlukan budaya kearifan lingkungan. Masyarakat diharapkan sadar dan cinta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Dunia usaha berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dengan sebagian keuntungan dipergunakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pemerintah menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan skala prioritas pada green development. Sehingga indikator pembangunan makro yang diperoleh merupakan *The Green Gross Domestic Product Indicator* (*Green GDP*).

Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Terpenuhinya konsepsi pembangunan yang berkelanjutan memerlukan nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan yang terdiri dari butir-butir sebagai berikut:

- a. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup;

- b. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan



Pembangunan berkelanjutan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada; mulai dari sisi fisik, biotik, dan budaya
 Sumber gambar: Google

keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsinya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (*constraint*) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan konsekuen;

c. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya;

d. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir;

e. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan;

f. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan

kerusakan lingkungan perlu dihindari bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkannya.

Bencana lingkungan yang melanda dunia global yang diakibatkan adanya global warming yang berkaitan dengan iklim ekstrim, dampak El nino dan La nina (El Nino dan La Nina adalah perubahan temperatur permukaan air secara fluktuatif di timur Samudra Pasifik. Efek El Nino ini dideskripsikan tahun 1923 oleh Sir Gilbert Thomas Walker. El Nino merupakan fenomena atmosfer yang disebut Southern Oscillation (SO) karenanya disebut El Nino SO atau ENSO), merupakan pertanda alam sudah dieksploitasi oleh manusia melalui program-program pembangunan yang berlebihan. Sehingga kapasitas daya dukung lingkungan alam tersebut menjadi berkurang bahkan menghilang secara perlahan tetapi pasti terjadi.

Pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan

manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban. Sistem manajemen pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mendorong pengelolaan program pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang bias dilakukan adalah melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk atau pengurangan pajak bagi kegiatan pembangunan yang berprinsip mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu masyarakat luas diberikan kesempatan luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok untuk mengontrol setiap proses pembangunan menuju terciptanya prinsip-prinsip *Good Environmental Governance (GEG)*, antara lain transparansi, *fairness*, partisipasi multi *stakeholders*, dan akuntabel.

4. Isu- Isu Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan adalah segala upaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tanpa melakukan eksploitasi sumber daya alam di luar batas kemampuan bumi itu sendiri. Berdasarkan pandangan tersebut, jelas terlihat bahwa Pembangunan berkelanjutan memiliki lingkup dan dimensi yang sangat luas, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* tidak saja akan membahas isu-isu lingkungan hidup saja, tetapi juga membahas isu-isu pertumbuhan ekonomi, pemerataan

dan pembangunan sosial. Isu-isu yang dibahas antara lain adalah:

- a. pembiayaan pembangunan berkelanjutan;
- b. beralih teknologi dan pembinaan kemampuan;
- c. *governance*/struktur institusi untuk pembangunan berkelanjutan;
- d. globalisasi;
- e. kesehatan;
- f. energi;
- g. konsumsi berkelanjutan dan pola produksi;
- h. penghapusan kemiskinan;
- i. air bersih dan sanitasi.

Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan perubahan cara pandang dan tingkah laku dari semua komponen masyarakat. Bagi Indonesia sendiri, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan publik mengenai pentingnya Pembangunan Berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi para pihak yang berkepentingan atau pelaku (*stakeholders*). Hirauan (*concerns*) utama yang akan menjadi titik perhatian para pelaku utama (*major stakeholders*) mencakup antara lain:

- a. Kemungkinan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi dan liberalisasi ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang;
- b. Perhatian yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan *good governance*, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan peran pelaku dalam pengambilan keputusan;
- c. Gagasan "*ecological debt*" dalam wujud debt for nature swap dalam upaya penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang.

5. Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan mempunyai arti upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat masa kini dengan tanpa mengurangi kemampuan atau kebutuhan generasi mendatang. Perencanaan menjadi titik awal dalam proses pembangunan, sehingga keterlibatan seluruh stakeholders sangat diperlukan dalam langkah awal yang sangat menentukan tersebut. Pengembangan suatu wilayah, tentunya memerlukan kajian yang sangat mendalam agar supaya prinsip berkelanjutan dapat terpenuhi.

Mekanisme dalam penyelenggaraan pembangunan akan baik apabila sesuai dengan alur proses manajemen, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Di dalam tahapan perencanaan harus sudah mulai dipikirkan kemungkinan tercapainya dalam tahapan pelaksanaan, artinya rencana kegiatan akan diupayakan secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Aspek-aspek apa yang perlu direncanakan untuk dilaksanakan sebagai contoh adalah bagaimana aspek pengembangan masyarakat; pengembangan produk yang mencakup aspek tata ruang, sarana dan prasarana, atraksi dan kegiatan, pendidikan dan sistem penghargaan; pengembangan usaha; pengembangan pemasaran. Akhirnya untuk menilai keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut diperlukan mekanisme tahapan pemantauan dan evaluasi yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih dijumpainya kendala-kendala penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya dalam hal strategi pembinaan, kerangka penataan termasuk di dalamnya pembentukan perangkat organisasi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah yang masih

memerlukan beberapa peraturan daerah serta koordinasi dengan sektor terkait secara terpadu dan mempunyai komitmen bersama untuk kepentingan pemenuhan hajat hidup masyarakat saat ini dan berkelanjutan sampai pada generasi masa depan.

Referensi:

Bank Dunia. 2012. *World Development Indicators 2012*, Washington D.C. : The World Bank.

Blum, Jurgen, nick manning, and Vivek Srivastava. 2012. "*Public Sector Management Reform: Toward a Problem-Solving Approach*", *Economic Premise, world Bank Poverty Reduction and Economic Management Network*, No. 100, December.

BPS. 2011. *BPS Strategic Data*, Jakarta : Statistics Indonesia.

Djajadiningrat, Surna T. 2001. *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Studio Tekno Ekonomi, Fakultas Teknologi Industri ITB Bandung.

Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Soerjani, M., R. Ahmad, dan R. Munir. 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nama : Hening Surya Bayu Anggoro, S.T.

E-mail : mine313nb@yahoo.com dan bayu.anggoro@dj.k.esdm.go.id

Peluncuran Peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 di Cirebon, Jawa Barat

Menteri ESDM Sudirman Said, selaku ketua pelaksana meluncurkan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 di peluncuran Hari Nusantara ke-15 tahun 2015 di Pelabuhan Kejawanan Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/6). Dalam acara tersebut ditandatangani sejumlah MoU antara Kementerian ESDM dengan pemerintah daerah Cirebon dan Aceh. (PSJ)



TINJAUAN Aplikasi e-Monev Sesuai Dengan PP 39 Tahun 2006

Oleh : Hari Dwi Wijayanto
(Perencana Pertama)



Pendahuluan

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Empat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi.

Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring

dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi.

Pembangunan aplikasi monev berbasis website (e-Monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi menurut PP 39 tahun 2006

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

PP ini didesain untuk melakukan pengendalian dan evaluasi APBN secara berjenjang mulai dari SKPD di Tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Kementerian/Lembaga di level nasional. Ada dua hal utama yang diatur dalam PP ini yaitu Sistem Pengendalian-Evaluasi dan Instrumen Pengendalian-Evaluasi.

Tujuan

Pembangunan e-Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional berdasarkan PP 39/2006 dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek
 - a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan.
 - b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan.
 - c. Melakukan pemantuan terhadap pencapaian target Prioritas Nasional.
 - d. Memfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan.
 - e. Mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

2. Jangka Panjang dan Berkelanjutan

- a. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja.
- b. Memberikan masukan bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi K/L dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan masukan bagi Pedoman Penyusunan program/kegiatan dan indikator yang baik.
- d. Memberikan masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan menengah (khususnya RPJMN 2015-2019).
- e. Sebagai bagian dari kerangka monev nasional terpadu yang akan diintegrasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Perbandingan Aplikasi PP 39/2006 Offline dan Aplikasi e-Monev Online

1. Pada aplikasi PP 39/2006 offline, formulir A, B, dan C belum terintegrasi, sedangkan pada aplikasi e-Monev online ketiga formulir sudah terintegrasi dalam satu form.
2. Basis data pada aplikasi PP 39/2006 offline berasal dari Dipa, sedangkan pada aplikasi e-Monev online sudah mengintegrasikan data antara Renja K/L dan RKA K/L.
3. Input data kumulatif triwulanan dilakukan secara offline, sedangkan pada aplikasi e-Monev online input data dilakukan secara online.
4. Permasalahan pada aplikasi PP 39/2006 offline dijabarkan tanpa dikelompokkan, sedangkan pada aplikasi e-Monev online permasalahan dikategorikan ke dalam kelompok permasalahan untuk mempermudah analisis dalam mengambil langkah tindak

lanjut.

5. Analisis status pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pada aplikasi PP 39/2006 offline tidak dilakukan lebih jauh, sedangkan pada aplikasi e-Monev online analisis status Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan/Program menggunakan notifikasi warna (hijau, kuning, merah) untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan.
6. Mekanisme pelaporan pada aplikasi PP 39/2006 offline dilakukan secara offline, sedangkan pada aplikasi e-Monev online dilakukan berjenjang oleh penanggungjawab program dan terkonsolidasi secara otomatis oleh sistem.
7. Update pada aplikasi PP 39/2006 offline dilakukan dengan mengunduh update secara manual, sedangkan pada aplikasi e-Monev online dilakukan melalui website secara terpusat sehingga secara langsung dapat diakses oleh pengguna.

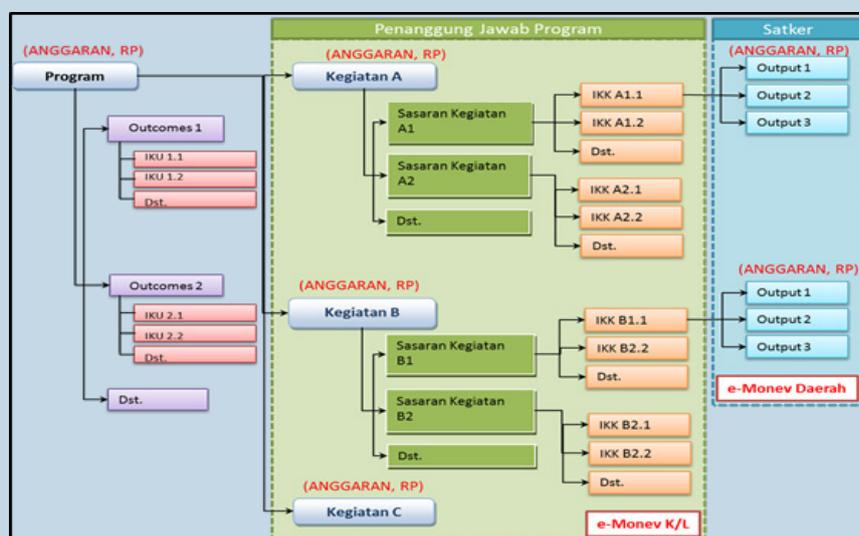
aplikasi e-Monev adalah Renja K/L dan RKA-K/L. Struktur data Renja K/L dan RKA-K/L dapat dilihat sebagaimana Gambar di atas. Berdasarkan Struktur Program dan Kegiatan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis K/L dicapai melalui program dan pencapaian suatu program didukung oleh kegiatan-kegiatan. Sehingga strukturnya dimulai dari sasaran strategis K/L yang diturunkan dalam tingkat program dan dirinci lagi kedalam tingkat kegiatan.
- b. Tanggungjawab pencapaian program berada di tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I.
- c. Sedangkan tanggung jawab pencapaian kegiatan berada di UKE II.
- d. Outcomes (hasil) merupakan entitas yang terikat kepada program dan tidak memiliki hirarki langsung kepada kegiatan. Secara hirarki data, nilai pencapaian outcome suatu program terpisah dari nilai pencapaian kegiatan terhadap program.
- e. Setiap outcome (hasil) mempunyai indikator outcomes masing-masing, namun tidak semua indikator outcomes dilengkapi

PRINSIP E-MONEV

1. Struktur Dasar Data

Data dasar yang digunakan dalam



Gambar 1. Struktur Data e-Monev

dengan angka/nilai target sehingga pengukuran capaian suatu program berdasarkan indikator outcome-nya sulit dilakukan.

- f. Indikator outcome bersifat jangka panjang (tahunan), sehingga sulit dapat diukur realisasinya dalam jangka pendek (triwulanan).
- g. Struktur Kegiatan terikat pada program dan bukan pada outcome. Sebagaimana dijelaskan pada poin (d) diatas, maka tingkat pencapaian kegiatan secara hirarki tidak dapat diukur terhadap outcome, namun hanya bisa diukur terhadap program terkait.
- h. Alokasi anggaran melekat pada kegiatan, sedangkan target kinerja tingkat kegiatan melekat pada Indikator Sasaran Kegiatan (ISK). Dalam struktur RKA-K/L, pagu anggaran melekat pada tiap kegiatan, sedangkan target kinerja tingkat kegiatan melekat pada tiap indikator sasaran kegiatan. Ke depan, pagu/alokasi anggaran akan diletakkan melekat pada tiap Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
- i. Setiap kegiatan mempunyai sasaran kegiatan, dimana setiap sasaran kegiatan memiliki indikator sasaran kegiatan tersendiri. Berdasarkan struktur data yang tersedia, maka kinerja suatu kegiatan diukur berdasarkan realisasi tiap Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).

2. Penetapan Target Triwulanan

Target triwulanan kegiatan dihitung berdasarkan breakdown dari target tahunan yang telah ditetapkan (tersedia dalam data dasar Renja K/L dan RKA K/L). Besarnya target triwulanan dihitung dan ditetapkan oleh K/L berdasarkan pada pengalaman pelaksanaan kegiatan, ketentuan (peraturan) terkait pelaksanaan yang berlaku dan professional judgement. Target triwulanan akan menjadi acuan

dalam penilaian Status Capaian Anggaran dan Status Capaian Kinerja tiap kegiatan yang dilakukan oleh K/L.

3. Penentuan nilai realisasi anggaran kegiatan

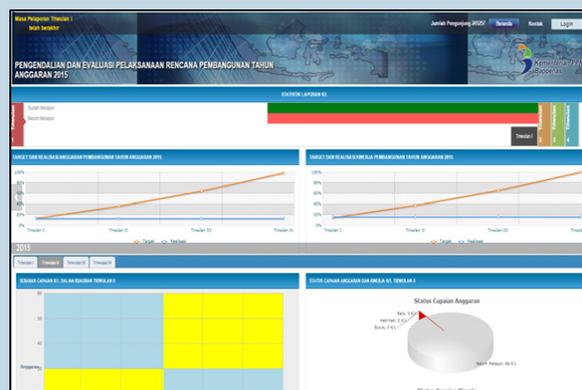
Nilai realisasi anggaran diinput dalam satuan rupiah sesuai data dalam dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bukan nilai rupiah pada dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) atau kwitansi pembayaran. Data realisasi anggaran per-kegiatan untuk kumulatif triwulanan juga dapat diperoleh dari SAI (Kementerian Keuangan).

4. Penentuan nilai realisasi kinerja kegiatan

Target kinerja suatu kegiatan ditetapkan berdasarkan target seluruh indikator sasaran pada kegiatan tersebut dan dinyatakan dalam satu nilai/besaran sebagai target kinerja kegiatan. Namun demikian, untuk pengukuran realisasi kinerja dilakukan pada tiap-tiap Indikator Sasaran Kegiatan pada kegiatan dimaksud.

Kesimpulan

Pengisian target dan realisasi keuangan serta fisik bisa menjadi media untuk memberikan pemahaman bahwa dalam proses monitoring dan evaluasi dapat ditemukan realisasi keuangan dan fisik tidak selamanya paralel. Ketika realisasi keuangan 100% tidak selamanya realisasi fisik juga 100%, demikian juga sebaliknya realisasi keuangan bisa saja kurang dari 100% tapi realisasi fisiknya 100%. Untuk mengukur realisasi fisik diperlukan penetapan indikator keluaran/output yang bisa



Gambar 2. Tampilan Depan Aplikasi e-Monev

terukur agar dapat menggambarkan capaian sebenarnya.

Instrumen yang ada dalam PP ini secara khusus ditujukan untuk pengendalian dan evaluasi rencana kerja sehingga pelaksanaan sesuai jadwal menjadi sangat penting untuk menghitung realisasi fisik dan keuangan per triwulan.

Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk menerapkan sistem ini untuk pelaksanaan evaluasi dan pengendalian implementasi. Harapannya adalah agar dikemudian hari cukup ada satu program aplikasi yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan, karena aplikasi ini tidak hanya di Bappenas, tetapi juga aplikasi monev di Kementerian Keuangan dan aplikasi monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dari LKPP-RI. Sehingga tidak terlalu banyak laporan dan dapat lebih efisien karena cukup satu aplikasi yang harus dikerjakan yang mampu mencakup seluruh kepentingan yang diinginkan tentunya disertai dengan penyempurnaan terlebih dahulu pada aplikasi tersebut.

INSPEKSI PLTU TANJUNG AWAR-AWAR 2 x 350 MW

Oleh : Ahmad Amiruddin & Irfan Kurniawan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang mencapai sekitar 8-9% per tahun harus diimbangi dengan pasokan tenaga listrik yang handal. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini, pemerintah telah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit (*Fast Track Program/FTP*) Tahap I dan II. Diharapkan FTP Tahap I telah selesai tahun ini (2015).

Dalam rangka pemantauan perkembangan proyek pembangunan pembangkit yang termasuk dalam FTP Tahap I, Inspektur ketenagalistrikan melaksanakan inspeksi pada pembangkit-pembangkit yang belum selesai. Tim Inspektur Ketenagalistrikan telah melaksanakan pemantauan perkembangan pembangunan PLTU III Jawa Timur – Tanjung Awar-awar 2 x 350 MW yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII



Gambar 1. PLTU Tanjung Awar-awar.
INFORMASI PROYEK

PLTU Tanjung Awar-awar adalah bagian dari program FTP Tahap I yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa Bali yang terus bertumbuh. Pembangkit ini dibangun bersama dengan pembangkit lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.



Gambar 2. Peta lokasi proyek PLTU Tanjung Awar-awar.

Luas lahan lokasi PLTU ini adalah 80 hektar yang dahulunya merupakan lahan milik Kementerian Kehutanan yang berlokasi di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sistem pendinginan PLTU menggunakan siklus air terbuka memanfaatkan air laut yang disuplai melalui basin dengan kedalaman ± 8 m.



Gambar 3. Ilustrasi lokasi proyek PLTU Tanjung Awar-awar.

Batu bara yang digunakan pada PLTU ini adalah jenis kalori rendah (*Low Rank Coal*) antara 3900-4500 Kcal/kg. Batubara disuplai melalui dua *ship unloader* yang masing-masing berkemampuan 1250 ton/jam.



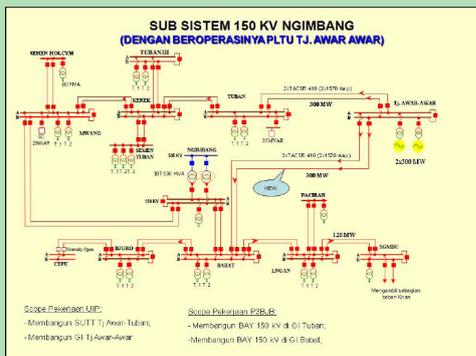
Gambar 4. Ship Unloader PLTU Tj. Awar-awar.

Kapasitas penyimpanan batubara (*coal yard*) terdiri atas *life stock* dan *dead stock* yang masing-masing mampu menampung batubara sebanyak 54.000 ton dan 250.000 ton. *Life stock* mampu menampung batubara selama 7 (tujuh) hari, sedangkan *dead stock* mampu menampung untuk 30 (tiga puluh) hari. Batu bara disuplai dari luar pulau Jawa diantaranya dari Arutmin, KPC dan PLN Batubara.



Gambar 5 : Coal Yard PLTU Tj. Awar-awar

Listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk menyuplai listrik ke sistem Jawa Bali melalui Gardu Induk 150 kV Babat dan Gardu Induk 150 kV Tuban dengan menggunakan saluran transmisi 4 (empat) sirkuit sepanjang ± 10 Km ke GI Tuban dan ± 40 Km ke GI Babat.



Gambar 6 : Sub Sistem yang terhubung dengan Tanjung Awar-awar

Proyek pembangunan PLTU Tanjung Awar-awar dikendalikan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan (UIP) VIII, Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) Pembangkit Jawa Bali (PJB) 3 yang dilaksanakan oleh kontraktor konsorsium JO SINOMACH, CNEEC dan PT Penta Adi Samudra.

Dalam penyelesaian pembangunan, PLTU Tanjung Awar-awar juga melibatkan tim dari PLN Prima Layanan Nasional Engineering untuk design review dan *approval drawing*, PLN JMK sebagai supervisi konstruksi, PLN Jaser untuk tes dan *commissioning*, Lahmeyer International-AECOM-CONNUSA-Amythas untuk konsultan QA serta PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) sebagai aset operator.

STATUS PROYEK

Pada awalnya PLTU Tanjung Awar-Awar masuki tahap *Commercial Operation Date* (COD) untuk unit 1 pada tanggal 11 September 2013 dan untuk unit 2 pada tanggal 11 Desember 2013. Unit 1 telah COD pada tanggal 24 Januari 2014 dan jadwal COD unit 2 menjadi tanggal 31 Desember 2015.

Sejak dioperasikan sampai dengan bulan Desember 2014, *availability factor* dari unit 1 mencapai 94.8%, lebih tinggi dari yang direncanakan sebesar 87.04%. *Net Capacity Factor* juga lebih tinggi dari rencana, dimana realisasinya mencapai 73.63% dari target sebesar 55.3%.

Indikator	Sat	KONKIN UPJB 2014	BULAN DESEMBER 2014			s.d. BULAN DESEMBER 2014			Gap Pencapaian
			Rencana	Real PLTU#1	Pencapaian (%)	Kumulatif		Pencapaian (%)	
						Rencana	Real		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 7
EAFF	%	82.89	83.33	96.46	115.75	87.04	94.80	108.92	7.76
EFOR	%	8.58	5.83	3.54	100.00	5.82	6.03	92.81	0.21
SdOF	Kali/Unit	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	0.00	-0.50
NPHR	kCal/kWh	2,720	2,740	2,839	83.90	2,740	2,786	96.63	-46
Efficiency Thermal	%	31.38	31.38	29.26	93.25	31.38	30.86	98.34	-0.52
NCF	%	53.58	55.33	69.62	167.26	55.30	73.63	133.16	18.34

Tabel 1 : Data Operasional Unit 2

Sementara itu, unit 2 sedang dalam tahap konstruksi khususnya untuk turbin yang sedang dalam tahap perbaikan. Saat ini juga sedang dilaksanakan konstruksi *Coal Bed Shed* untuk mencegah *self combustion* yang terjadi di *coal yard area*.

Adapun progres keseluruhan proyek telah mencapai 97.46% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari – Juni Tahun 2015

oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda)

No.	KATEGORI	BOBOT	PROGRES		(%)	
			PLAN	ACTUAL	PLAN	ACTUAL
1	ENGINEERING	1.7	1.69	1.69	99.65	99.57
2	PROCUREMENT	57.729	57.41	57.37	99.45	99.37
3	CONSTRUCTION	36.323	34.84	35.22	95.91	96.97
4	OTHERS	4.248	1.81	3.18	42.68	74.81
TOTAL		100	95.75	97.46		

Tabel 2 : Progress Proyek

KENDALA DAN SOLUSI PROYEK



Gambar 7 : Turbin unit 2 sedang dalam perbaikan

Kendala utama belum terselesaikannya proyek adalah karena rusaknya turbin unit 2. Adapun kendala lainnya adalah dalam masa penyelesaian proyek (COD, TOC, STOP, warranty period sampai dengan proses penerbitan FAC) *as built drawing* masih belum lengkap/belum sepenuhnya disampaikan oleh kontraktor kepada PLN, juga ditemui beberapa permasalahan antara lain *punchlist*, NCR. Sementara itu dalam masa *commissioning* ditemukan permasalahan antara lain: prosedur pelaksanaan belum lengkap disampaikan oleh kontraktor, serta kurangnya persiapan *tools* dan *man power*.

Untuk mengatasi permasalahan turbin unit 2, kontraktor telah melakukan pemesanan turbin kepada manufaktur dan berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan turbin unit 2 pada akhir April 2015. Untuk mengatasi kendala lainnya PLN meminta kepada kontraktor untuk segera menyampaikan *as built drawing* secara lengkap untuk masing – masing scope pekerjaan untuk direview dan mendapat approval dari JMK. PLN juga telah meminta kepada kontraktor untuk segera penyelesaian pending items (*Punchlist* dan NCR) selama masa warranty dengan disupervisi oleh PLN JMK dan Konsultan QA/QC, dan PLN meminta kontraktor untuk mempersiapkan pelaksanaan *commissioning* dengan baik dan terencana, sehingga dapat dilaksanakan sesuai *schedule* yang ada dan dapat dilaksanakan dengan sukses.

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
2.	Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung
3.	Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
4.	Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015
5.	Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/ MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d 2024
6.	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/ MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan
7.	Keputusan Menteri ESDM No. 0171 K/90/ MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8.	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/ MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan

Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakorber KONSUIL-PPILN Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Keselamatan di sektor ketenagalistrikan merupakan prioritas. Untuk itu pemerintah mengharapkan peningkatan kinerja Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) dalam mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat membuka Rapat Koordinasi Bersama (Rakorber) antara Konsuil dan PPILN Wilayah Jawa, Bali, NTB dan NTT di Yogyakarta Selasa (30/3).

"Konsuil dan PPILN adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keselamatan Ketenagalistrikan terutama dalam jaringan rendah. Karena bagaimanapun juga keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu yang mutlak dan harus ditetapkan", ungkap Jarman. Konsuil dan PPILN disebutnya sebagai salah satu alat untuk menerapkan keselamatan ketenagalistrikan tersebut.

Ketua pelaksan rakorber, Sarwono mengatakan bahwa rapat koordinasi bersama antara Konsuil dan PPILN ini dilakukan dalam rangka mewujudkan konsistensi dan soliditas lembaga inspeksi teknik tegangan rendah guna meningkatkan percepatan pelayanan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan menyamakan persepsi serta

pemahaman dalam melaksanakan pedoman tata laksana pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah.

Hal ini telah disepakati dan ditetapkan bersama antara Konsuil dan PPILN



Pemukulan gong oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) untuk membuka rakorber KONSUIL-PPILN di Yogyakarta

sebagai tidak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2014. Sarwono juga mengatakan bahwa cara ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan dan Indonesia bagian timur.

Ketua Konsuil Pusat HM. Djamil Baridjambek menyambut baik diadakannya Rakorber ini dan mengharapkan bahwa gesekan-gesekan yang ada selama ini dapat diminimalisasi. Seperti bila ada konsumen yang Tidak Lulus Operasi (TLO) akan tetap TLO pada lembaga inspeksi yang lain, dan apabila sudah diperbaiki akan tetap di periksa oleh

lembaga yang pertama kali melakukan pekerjaan, hal inipun diamini oleh H. Edi Sayudi selaku Direktur Utama PPILN. Edi dalam sambutannya mengharapkan selesai rakorber ini, semua pihak bisa pulang dengan membawa harapan yang besar untuk perubahan dan mengurangi gesekan yang selama ini sering terjadi.

Di akhir sambutannya Dirjen Ketenagalistrikan mengingatkan agar dalam melakukan register SLO harus sesuai dengan tata cara yang ada.

"Kami melihat dalam penomoran SLO masih belum mengikuti tata acuan yang berlaku, sehingga pada waktu di register akan bermasalah. Mohon diperbaiki," ujarnya. Karena kalau ada

permasalahan hukum dikemudian hari kami hanya berpegang pada register yang ada. "Kami akan menurunkan inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan register yang ada" sambung Jarman

Disela-sela acara Rakorber ini juga dilaksanakan pembacaan Ikrar kebulatan tekat Konsuil-PPILN dan penandatanganan kesepakatan bersama guna menguatkan kebersamaan yang ada. Selain itu juga dibentuk Tim Pengendali dan Peningkatan Pelayanan (TP3) yang akan memediasi dan meredam masalah-masalah yang ada di lapangan. (JFN)

LAMPU SOLAR HEMAT ENERGI “LITER OF LIGHT PROJECT”

Penulis : David F Silalahi, Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Muda



Pernahkan Anda membayangkan bahwa air dapat memberikan terang? Tentu pertanyaan berikutnya yang terlintas di pikiran Anda adalah bagaimana bisa? Ide menggunakan media air untuk pencahayaan awalnya ditemukan oleh mekanik asal Brasil, Alfredo Moser.

Pada tahun 2002, Alfredo mencari cara untuk mengganti cahaya lampu listrik dengan menggunakan botol air. Dengan menggunakan pengetahuan dasar dan bahan-bahan yang sederhana, yaitu botol bekas 1,5 liter, air bersih, dan klorin, ia menciptakan lampu solar yang memanfaatkan radiasi cahaya matahari.

Kemudian oleh sekelompok mahasiswa Massachusets Institute of Technology (MIT), ide cemerlang Alfredo ini diadopsi dengan skala besar di Manila, yang mereka namakan proyek “*Liter of Light*” melalui lembaga swadaya masyarakat ‘*My Shelter Foundation*’, untuk menerangi rumah-rumah masyarakat miskin Filipina di daerah pinggiran yang tidak memiliki akses listrik. Pada tahun pertamanya, lampu solar ini telah terpasang lebih dari 200.000 buah lampu botol.

CARA KERJA LAMPU SOLAR

Botol plastik bekas diisi dengan air dan pemutih (klorin). Ini terdiri dari botol PET 1,5 liter diisi dengan air dan pemutih (klorin). Fungsi pemutih adalah agar air tetap bersih dan transparan, mencegah alga tumbuh di dalam sehingga air tidak berubah warna menjadi hijau.

Sebuah lem khusus digunakan untuk melekatkan dan menyegel botol ke atap tempatnya terpasang. Air dalam botol akan menangkap cahaya matahari, dan meneruskan cahaya tersebut ke sekitarnya.

Kuat cahaya dari lampu solar ini setara dengan cahaya yang dihasilkan oleh lampu daya listrik 55 Watt. Mari kita lihat langkah-langkah dalam pembuatan lampu solar sederhana ini.

PROSES PEMBUATAN

Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan lampu solar, antara lain: botol minuman soda bekas 1,5 liter, *galvanized iron* (plat seng), *sealant* karet, cairan pemutih (klorin), dan air jernih.

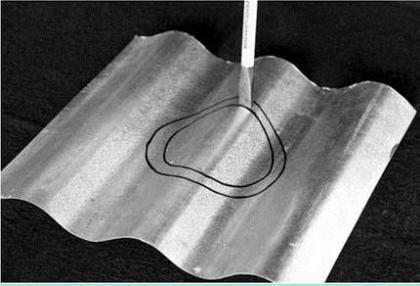


Langkah 1: Potong seluas 9 x 10 inci lembaran *Galvanized Iron* (GI) (plat seng bergelombang atau datar sesuai dengan bentuk atap yang akan dipasang kemudian)



Langkah 2: Di tengah-tengah potongan lembaran GI tersebut, gambarlah 2 buah lingkaran. Lingkaran yang lebih besar berdiameter sama dengan diameter dari botol. Dan lingkaran didalamnya kira-kira 1 cm lebih kecil. Kemudian lingkaran yang lebih kecil (sebelah dalam) dipotong.





Langkah 5: Kemudian masukkan botol ke dalam lembar GI sampai batas permukaan yang digosok sebelumnya. Oleskan *sealant karet* pada bagian atas dan bawah botol yang menempel pada lembar GI. Tunggu sampai kering.



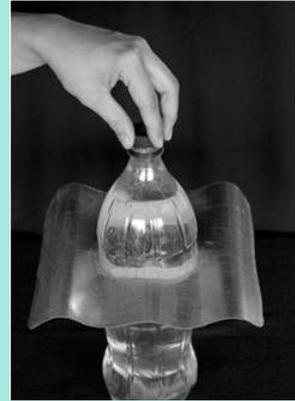
Langkah 3: Jarak 1 cm tersebut dipotong membentuk strip dan ditekuk ke atas tegak lurus dengan lembar GI.



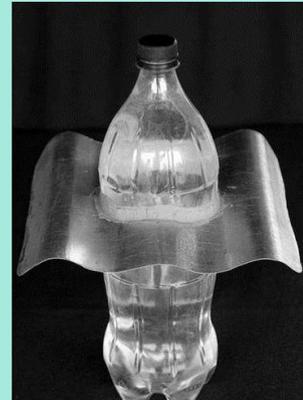
Langkah 4: Dengan menggunakan amplas, gosoklah permukaan pada kira-kira sepertiga tinggi dari bagian atas botol soda, yaitu di mana botol akan direkatkan dengan lembar GI, permukaan yang telah digosok ini berfungsi untuk memungkinkan sealant karet agar merekat dengan baik.



Langkah 6: Selanjutnya isilah botol tersebut dengan dengan air bersih sampai penuh dan campurkan cairan pemutih (klorin) sebanyak 10 mililiter. Kemudian tutup botol dengan rapat. Pastikan tidak ada udara didalam botol tersebut.



Langkah 7: Lampu solar siap untuk dipasang. Berikutnya adalah proses pemasangan pada atap rumah.



Langkah 8: Buatlah lubang di atap yang besarnya sama dengan diameter botol tadi. Kemudian olesi sekitar lubang tersebut dengan *sealant* karet.



Langkah 9: Masukkan lampu botol yang telah dibuat sebelumnya ke lubang pada atap tersebut. Pastikan lampu terpasang kokoh pada tempatnya.

Langkah 10: Buatlah 4 lubang di setiap sisi lembar GI yang menembus atap rumah dengan menggunakan bor dan gunakan paku keling untuk menyatukan lembar GI dengan atap rumah.



Langkah 11: Oleskan *sealant* karet pada semua tepi lembar GI botol tersebut untuk mencegah kebocoran atap pada saat hujan. Pastikan juga paku keling juga turut diolesi *sealant* tersebut.



Langkah 12: Pada tutup botol tambahkan plastic pelindung dan oleskan juga *sealant* karet agar tutup tersebut benar-benar tertutup rapat.



Demikianlah proses pembuatan dan pemasangannya. Lampu solar pun telah terpasang dan siap menerangi ruangan dibawahnya. Lampu solar ini diperkirakan memiliki umur pakai mencapai 5 tahun.

MANFAAT POSITIF LAINNYA DARI LAMPU SOLAR

Selain fungsi pemanfaatan botol bekas minuman soda, penggunaan lampu solar ini pun sama sekali tidak mengkonsumsi daya listrik. Dengan kuat cahaya yang setara dengan lampu listrik daya 55 watt per lampu solar ini, maka dalam satu bulan masing-masing rumah yang dipasang 3 lampu solar, diperkirakan menghemat listrik sekitar 59 kWh per bulan yang setara dengan uang senilai Rp. 296.000 dalam setahun.

Dalam setahun, tiadanya konsumsi listrik membuat lampu solar ini dapat menghemat emisi setara 17 kgCO₂. Yang tentunya ini sangat ramah lingkungan dan baik terhadap bumi karena dapat mengurangi dampak pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim.

Di Indonesia pun, lampu solar seperti ini dapat diterapkan. Terutama pada pemukiman pada masyarakat yang rumahnya tidak memiliki akses listrik, dan bangunan rumah tidak pula memiliki jendela yang cukup untuk cahaya dapat masuk menerangi ruangan-ruangan di dalamnya. Bahkan rumah-rumah pada daerah yang sudah berlistrik pun dapat menggunakannya untuk menghemat penggunaan listrik sehari-hari.

REFERENSI

- *How to build a Solar Bottle Bulb – Liter of Light*, <http://literoflight.org>
- Alfred Moser: *Bottle light inventor proud to be poor* <http://www.bbc.com/news/magazine-23536914>
- *MIT Students Install 10,000 Revolutionary Solar Bottle Lamps in Manila Slums*, <http://inhabitat.com/mit-students-install-10000-revolutionary-solar-bottle-lapms-in-manila-slums>
- *Plastic bottles could bring renewable lighting to all*, http://positivenews.org.uk/2013/environment/renewable_energy/10901/plastic-bottles-bring-renewable-lighting/

Menyambut Bulan Ramadhan, Menteri ESDM Adakan Temu Ramah dengan Stakeholder



Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan ia dan jajarannya siap melayani masyarakat.

Menjelang bulan Ramadhan, Menteri ESDM Sudirman Said mengadakan temu ramah dengan para *stakeholder* pada Selasa (17/6), bertempat di Plaza Kementerian ESDM. Acara ini digagas untuk mendekatkan para pemangku kepentingan di sektor ESDM dan memupuk rasa kebersamaan. Saat menyampaikan sambutannya, Menteri mengajak para pejabat eselon I di Kementerian ESDM untuk ikut maju ke depan sebagai simbol kesiapan dalam melayani masyarakat.

Menteri menyampaikan terimakasih pada para *stakeholder* untuk dukungan dan responnya selama ini. Menteri juga mengajak para pengusaha untuk bersama-sama bekerja keras untuk masa depan yang lebih kuat.

"Betul kita mengalami tekanan rupiah dan pelambatan ekonomi, tapi jika kita bekerja keras bersama-sama dan menerapkan reformasi struktural, kita bisa mencapai situasi yang kita inginkan," ujar Menteri. Menteri mengungkapkan bahwa proses penataan pada sektor ESDM seringkali mendapatkan pertanyaan dari para pelaku usaha.

"Apakah penataan ini kondusif bagi

bisnis? Pengusaha yang serius akan sangat membutuhkan market yang sehat. Penataan diperlukan untuk memberikan *fair treatment*; yang perform diberikan k e s e m p a t a n , sementara yang tidak perform diberikan konsekuensi atau punishment. Tujuannya adalah bagaimana pasar ke depan lebih

sehat; baik pasar migas, listrik, mineral maupun energi baru terbarukan," papar Menteri.

Dijelaskan oleh Menteri, pemerintah memiliki agenda besar baik di sektor energi baru terbarukan (EBT), sektor ketenagalistrikan, sektor migas, dan sektor mineral. Di sektor EBT, porsi EBT dalam bauran energi tengah diupayakan naik menjadi 25% dalam waktu sepuluh tahun ke depan dari porsi 5-6% yang ada saat ini. Pemerintah pun mendorong konservasi energi.

"Undang-Undang mengamanatkan kita untuk mendorong energi baru terbarukan, meminimalisir migas, dan mengoptimalkan gas dan batu bara. Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya; kita habis-habisan mengeksplor migas namun energi baru tidak tersentuh. Ini pelan-pelan akan kita balik," Menteri menjelaskan.

Untuk sektor ketenagalistrikan, Program 35.000 MW sudah menanti. Menteri menegaskan bahwa program ini harus sukses dengan segala dinamikanya. Program ini juga diharapkan dapat membangun industri pendukungnya sehingga komponen

lokal perlu ditingkatkan sebaik-baiknya. Dalam sektor migas, pemerintah ingin meningkatkan cadangan dengan eksplorasi besar-besaran. Menteri telah membentuk Komite Eksplorasi Nasional yang akan mereview peraturan dan kebijakan agar bisa mendukung eksplorasi secara masif. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur migas.

Pada sektor mineral, Menteri menyatakan illegal mining harus diselesaikan. Ini akan dijadikan agenda dalam waktu dekat. Menteri percaya bahwa ini semua bisa dikerjakan kalau pelaku usaha memiliki satu visi untuk mencapai pasar yang sehat. "Kami ingin meningkatkan *public trust*, karena tanpa kepercayaan dari bapak-ibu semua, regulasi apapun tidak akan diterima dengan baik," tutur Menteri.

Kementerian ESDM telah melakukan proses *trust building*, mulai dari penyegaran pimpinan hingga engagement dengan para *stakeholder* melaluidiskusikelompokantarsubsektor untuk mencairkan kebekuan yang ada selama ini. Menteri mengharapkan para pemangku kepentingan di sektor ESDM dapat berdialog hingga pada akhirnya dapat bersinergi.

Sehubungan dengan bulan Ramadhan yang sebentar lagi dijelang, Menteri ESDM mewakili keluarga besar ESDM mohon maaf dan mendoakan supaya diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam acara temu ramah ini, diberikan pula beasiswa bagi para pelajar dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Acara diselingi dengan hiburan musik yang melantunkan lagu-lagu tradisional serta ditutup dengan santap kuliner bersama. (AMH)

Instalasi Listrik Rumah Tangga Harus Dicek Tiap 15 Tahun



Untuk menghindari dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik, instalasi listrik rumah tinggal harus dicek setiap lima belas tahun. Sebelum dialiri listrik, rumah tersebut harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan kementerian ESDM Jarman dalam Program *Coffee Break* di Studi TVOne Epicentrum Jakarta, Selasa (16/6).

Acara yang dipandu oleh Hilbram Dunar dan Nadya Mulya tersebut menghadirkan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Pengamat Ketenagalistrikan Universitas Indonesia Iwa Garniwa, serta Jenny Tan selaku artis dan konsumen listrik. Acara sendiri mengangkat tema Keselamatan Ketenagalistrikan yang bertujuan mengajak masyarakat menggunakan listrik secara benar.

Menurut Jarman, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan

masyarakat agar terhindar dari bahaya listrik. Menurutnya hal pertama yang harus diperhatikan adalah peralatan listrik yang terpasang harus Standard Nasional Indonesia (SNI). "Untuk mengecek peralatan listrik berSNI dapat mengakses website www.djk.esdm.go.id" ungkap Jarman.

Selain menggunakan peralatan listrik yang telah SNI, menurutnya tenaga teknik yang memasang instalasi harus memiliki sertifikat kompetensi. Jarman juga mengingatkan bahwa Badan usaha yang memasang instalasi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha.] Hal tersebut diamini oleh Iwa Garniwa selaku pengamat ketenagalistrikan.

"Pemerintah harus mengawasi peralatan listrik yang beredar di pasar," ungkap Iwa. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan pada masyarakat harus terus ditingkatkan.

Salah satu ketidaktahuan yang sering dilakukan masyarakat adalah menumpuk colokan listrik. Hal tersebut yang bisa membuat bara api dan menyebabkan kebakaran.

Pelanggaran terhadap kesalahan penggunaan tenaga listrik menurut Jarman dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Ketenagalistrikan dan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN siap diturunkan untuk penertiban tersebut.

Selain pemakaian peralatan listrik yang aman, Dirjen Ketenagalistrikan juga menganjurkan masyarakat untuk melakukan penghematan listrik. Selain untuk menghemat pasokan listrik, penggunaan peralatan listrik yang tidak standard dapat membuat pemborosan listrik. (PSJ)

Hindari Bahaya, Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan Wajib Dipenuhi

Listrik adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Namun listrik juga berpotensi menimbulkan bahaya. Untuk itu pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jarman M.Sc dalam program diskusi Ensikla di Kompas TV, Jumat (5/6).

"Sebelum instalasi listrik di rumah disambung harus tersertifikat laik operasi," ungkap Jarman. Ia menambahkan cara untuk menjaga keselamatan ketenagalistrikan adalah jangan sampai memasang kabel abal-abal dan bukan peruntukannya. Selain itu peralatan listrik yang dipasang harus memenuhi Standard Nasional Indonesia. "Pada saat memasang instalasi listrik, satu stop kontak maksimum satu konektor atau T, jangan lebih. Hal ini yang perlu masyarakat tahu," tegasnya.

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Hal tersebut tertuang dalam UU no. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 42 ayat 1.

Beberapa langkah yang harus diperhatikan masyarakat untuk menjaga keselamatan ketenagalistrikan antara lain dengan menggunakan peralatan

listrik bertanda SNI, melakukan sertifikasi terhadap instalasi listrik masyarakat yang belum memiliki SLO, memastikan tenaga teknik yang bekerja telah memiliki sertifikat kompetensi dan memilih badan usaha yang memiliki Sertifikasi Badan Usaha.

Disampaikan kembali oleh Jarman, instalasi listrik harus mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang

masyarakat untuk mencegah bahaya-bahaya yang timbul akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Menurut Tulus Abadi Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), konsumen listrik harus menjalankan hak dan kewajiban selaku konsumen. Keselamatan ketenagalistrikan melalui SLO penting untuk diketahui masyarakat agar hak-hak sebagai konsumen untuk mendapatkan listrik yang aman dapat dipenuhi.

Idan Separo, seorang *public figure* yang hadir dalam diskusi tersebut berharap bahwa keselamatan ketenagalistrikan ini terus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menggalakkan kampanye keselamatan ketenagalistrikan untuk menghindari dari bahaya

yang tidak diinginkan. Ensikla di Kompas TV ini merupakan salah satu rangkaian sosialisasi ketenagalistrikan dari Ditjen Ketenagalistrikan kepada masyarakat lewat media massa. Dalam acara tersebut masyarakat juga dapat secara langsung bertanya atau memberikan pendapat seputar keselamatan ketenagalistrikan kepada pemerintah. (PSJ)

dilaksanakan oleh pihak ketiga. Registrasi SLO sendiri dilaksanakan secara online dan mendapatkan pengesahan oleh pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan. Hal tersebut berlaku untuk instalasi listrik di rumah-rumah baru maupun lama.

"Instalasi rumah-rumah lama yang belum memiliki SLO juga diwajibkan diperiksa dan harus mendapat SLO. Beberapa hal yang dicek diantaranya adalah kabel dan sop kontak. Jika tidak layak operasi PLN tidak boleh menyambung instalasi listrik," ungkap Jarman.

Pemahaman keselamatan ketenagalistrikan ini penting diketahui



MKI Sumbang Pemikiran Untuk Program 35.000 MW

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dalam enam tahun karyanya telah memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan untuk sektor ketenagalistrikan. Menurut ketua umum MKI Moch Harry Jaya Pahlawan, MKI telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perumusan peraturan perundang-undangan di sektor ketenagalistrikan.

Disamping itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan konferensi CEPSI di Nusa Dua Bali, Konferensi Ketenagalistrikan CIEPS di Jakarta, pelaksanaan Hari Listrik Nasional (HLN) tahun 2013 dan 2014, serta seminar dan diskusi bulanan merupakan wujud karya nyata MKI. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI yang diselenggarakan di Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jakarta, Kamis (12/3).

Munas VI MKI yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini mengambil tema 'Kesiapan dan terobosan stakeholder ketenagalistrikan dalam membangun pembangkit tenaga listrik 35.000 MW'. Menurut Harry, tahun 2013 yang lalu MKI menyelenggarakan simposium dan menghasilkan sumbangan pemikiran MKI tentang keamanan pasokan tenaga listrik untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dokumen yang diserahkan kepada pemerintah dan DPR tersebut berisi

pemikiran-pemikiran anggota MKI mengenai berbagai persoalan kelistrikan yang akan dialami oleh bangsa Indonesia ke depan. "Dalam dokumen tersebut dicantumkan beberapa indikasi permasalahan sektor ketenagalistrikan hingga lima tahun ke depan," ungkap



Ketua Umum MKI Moch Harry Jaya Pahlawan menegaskan bahwa peningkatan kemampuan SDM sangat penting untuk mengelola sistem kelistrikan lima tahun ke depan.

Harry. Beberapa persoalan yang diangkat dalam sumbangan pemikiran MKI antara lain pasokan tenaga listrik yang akan mengalami krisis, baik di sisi pembangkitan maupun penyaluran, permasalahan subsidi listrik, dan usulan agar subsidi listrik dilakukan tepat sasaran. Hal tersebut menurut Harry sejalan dengan rencana pemerintah yang akan membangun pembangkit listrik dalam program 35.000 MW berikut gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusinya dalam lima tahun ke depan. MKI berkomitmen untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk program 35.000 MW demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam Munas VI ini juga diselenggarakan Diskusi Panel yang menghadirkan Dirjen Ketenagalistrikan, Direksi PT PLN (Persero), dan Ketua Umum MKI.

Melalui diskusi panel ini, MKI ingin memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah dan PT PLN dalam menyelesaikan berbagai persoalan sebelum program 35.000 MW dimulai.

"Berbagai persoalan seperti pengadaan lahan, ketersediaan energi primer, perizinan, dan pemilihan teknologi yang tepat merupakan persoalan harus diselesaikan sebelum program 35.000 MW dimulai," ungkap Harry. "Tidak kurang pentingnya adalah peningkatan kemampuan SDM untuk mengelola sistem kelistrikan lima tahun ke depan," imbuhnya.

Menurut Harry, anggota MKI saat ini berjumlah 37 anggota utama, 85 anggota perusahaan, dan 378 anggota perseorangan. Dalam Munas VI tersebut MKI memberikan penghargaan kepada enam inisiator pendiri MKI yaitu Luluk Sumiarso, Endro Utomo Notodisuryo, Adi Satria, Indrajit Kartowiyono, Anton S Wahyu Sudibyo, Syahrir Anwar. "Semoga penganugerahan ini dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada seluruh anggota MKI dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan," tutur Harry.

MKI berharap menjadi organisasi terbuka dan terpercaya sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi permasalahan di sektor ketenagalistrikan. "Sehingga MKI terus berperan berpartisipasi dan mendorong pembangunan di sektor ketenagalistrikan dengan energi yang ramah lingkungan dan efisien," tutup Harry. (PSJ)

Pemaparan Program 35.000 MW dalam Indonesia Electricity Show 2015



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad membuka Pameran Indonesia Electricity Show (IES) 2015 di Istora, Jakarta.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad membuka Pameran Indonesia Electricity Show (IES) 2015 di Istora, Jakarta (19/3). Munir menyampaikan sambutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berhalangan hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyoroti Program 35.000 MW yang merupakan upaya untuk mencapai kedaulatan energi. Agar program ini berhasil, Menteri menyatakan dibutuhkan kerja sama dari seluruh unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, PT PLN (Persero) dan stakeholders dengan mengesampingkan ego sektoralnya.

Menteri melanjutkan jika saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai langkah untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur

tenaga listrik terkait Program 35.000 MW, antara lain regulasi mengenai penunjukan dan pemilihan langsung oleh PT PLN (Persero) serta dibentuknya Tim Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

Menteri berharap Program 35.000 MW dapat meningkatkan rasio elektrifikasi sehingga di akhir tahun 2019, rasio elektrifikasi bisa mencapai 97,35%. Sampai akhir tahun 2014, rasio elektrifikasi Indonesia adalah sebesar 84,30%.

Sebelum pembukaan Pameran IES 2015, ada penyampaian paparan singkat oleh Munir Achmad mewakili Kementerian ESDM, Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Teddy C Sianturi dari Kementerian Perindustrian dan Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Hanung Harimba Rahman dari Badan Koordinasi Penanaman Modam

(BKPM). Topik paparan Munir adalah mengenai Program 35.000 MW yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Ia menjelaskan jika dua sampai tiga tahun yang lalu, penambahan pasokan ketenagalistrikan hanya 2.000-3.000 MW setiap tahunnya. Sementara, untuk lima tahun mendatang pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di kisaran 6%-6.5% per tahun.

"Kita mengharapkan pertumbuhan kelistrikan adalah 1.5 kali dari pertumbuhan ekonomi atau sekitar 8%-9% per tahun. Untuk menutupi kebutuhan listrik yang akan datang, setiap tahun kita harus bisa menyediakan daya listrik 7.000 MW," ujar Munir.

Menurut Munir, hal tersebut mendorong pemerintah dalam mencanangkan Program 35.000 MW untuk lima tahun mendatang, di luar proyek pembangkit yang on going dengan kapasitas 7.900 MW. Munir menjelaskan bahwa total pertumbuhan kelistrikan hingga lima tahun mendatang adalah sebesar 42.900 MW.

Munir menegaskan jika peran swasta sangat besar dalam program ini, terutama terkait dengan pendanaan. Dari 35.000 MW, PLN sanggup membiayai 10.000 MW sementara sisanya akan dibangun oleh swasta. Mengenai pelaksanaan 10.000 MW oleh PLN, Munir menyampaikan jika PLN sudah mulai melakukan perencanaan dan beberapa konstruksi.

Bersambung ke halaman 55

Sekilas Tentang Program Listrik Perdesaan



Salah satu penerima program bantuan listrik perdesaan dari pemerintah.

Kita tentu sering mendengar program pemerintah yang bernama listrik perdesaan. Namun tidak banyak diantara kita yang tahu tentang teknis pelaksanaan program yang melistriki Indonesia hingga ke desa-desa ini. Sebenarnya, bagaimana pelaksanaan program listrik perdesaan? Dalam rapat Pembinaan Dan Koordinasi Dengan Pemda/PLN/Instansi Terkait Dalam Perencanaan Pengembangan Listrik Perdesaan, yang digelar di Bekasi hari Rabu (29/4) lalu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Ahmad menjelaskan secara detail mengenai program ini.

Dasar hukum dari program listrik perdesaan mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan

perbatasan; dan pembangunan listrik perdesaan. Pembangunan ketenagalistrikan sendiri memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari latar belakang tersebut, program listrik perdesaan sebenarnya adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan. Program ini merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada Provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah.

Tujuan Listrik Perdesaan antara lain untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan, meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan, memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya,

serta meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Untuk tahun anggaran 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Listrik Perdesaan sebesar Rp. 3,107 Triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk perluasan jaringan dengan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.217 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.260 kms dan Gardu Distribusi sebanyak 2.870 unit kapasitas 178 MVA serta Program Penyusunan Perencanaan Penyambungan Dan Instalasi Listrik Gratis Kepada Nelayan Dan Rakyat Tidak Mampu dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran direncanakan sebanyak 121.399 RTS.

Selain membangun jaringan hingga ke pelosok, Pemerintah juga memiliki program instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan. Program instalasi listrik pada Rumah Tangga Sasaran meliputi instalasi listrik (3 titik lampu, 1 kotak kontak, 1 grounding, dan 1 panel MCB), pemeriksaan instalasi listrik, penyambungan 450 VA, dan penyediaan lampu hemat energi.

Program ini bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang sering terjadi diantaranya kesulitan mendapatkan Perizinan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Jaringan Lisdes yang melintasi hutan lindung dan perkebunan, permintaan ganti rugi (lahan/tanaman) dari masyarakat, lokasi semakin sulit dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan Pendanaan yang tersedia. Namun menurut Munir, hal ini bisa diselesaikan dengan koordinasi

Ditjen Ketenagalistrikan Meriahkan Pameran AITIS 2015



Petugas informasi ESDM sedang menjelaskan pada pengunjung mengenai kondisi kelistrikan nasional

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ingin mengajak semua pemerintah daerah untuk peduli pada keberlangsungan pembangunan kelistrikan. Selain itu Ditjen Ketenagalistrikan ingin agar pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota mengetahui program pemerintah pusat di sektor ketenagalistrikan seperti program listrik perdesaan dan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Untuk itu, agar lebih mendekatkan kepada pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten, Ditjen Ketenagalistrikan berpartisipasi dalam Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) International Trade and Investment Summit 2015 yang digelar di Hall A Jakarta International EXPO, Kemayoran Jakarta. Acara yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo hari Rabu (13/5) ini akan berakhir hari Jumat (15/5).

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa perdagangan dan investasi saat ini menjadi kunci bagi pertumbuhan sebuah daerah.

"Saya titip, jangan sampai pimpinan-pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, terjebak pada rutinitas birokrasi sehingga melupakan membangun sebuah

strategi kebijakan ekonomi di daerah," ungkap Jokowi. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga memotivasi daerah untuk meningkatkan investasi dengan pembangunan karakter.

"Membangun karakter sebuah kabupaten, sebuah kota itu sangat penting. Membangun identitas sebuah kota dan kabupaten itu sangat diperlukan di bidang investasi," tegas Jokowi.

Untuk menjelaskan mekanisme investasi di sektor ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan hadir dalam pameran tersebut bergabung dalam booth Kementerian ESDM. Untuk memudahkan pengunjung memahami investasi sektor ketenagalistrikan, selain membagi brosur, Ditjen Ketenagalistrikan memutar video tentang investasi ketenagalistrikan. Ditjen Ketenagalistrikan berharap dengan pameran APKASI ini, pemerintah Kabupaten dapat mendapatkan informasi terbaru di sektor ketenagalistrikan. (PSJ)



Seorang pengunjung sedang melihat-lihat brosur di booth Kementerian ESDM pada Pameran AITIS 2015

Seni Berbicara ala Larry King

Berbicara adalah bagaimana seseorang menyampaikan sebuah pesan secara lisan agar pesan tersebut dapat dimengerti oleh orang lain. Berbicara bertujuan agar audiens yang menjadi sasaran kita benar-benar mengerti dan memahami apa yang kita maksud.

Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut maka kita harus sangat meyakinkan pada saat berbicara. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari kita dihadapkan pada keadaan dimana kita harus berbicara di depan banyak orang, baik itu dalam acara meeting di kantor, menjadi moderator, maupun sekedar menjadi MC suatu acara.



Apabila kita masih ragu dan belum percaya diri dalam berbicara di acara tersebut, tentunya audiens pun akan menjadi ragu untuk mempercayai apa yang kita sampaikan.

Pada artikel ini, saya akan sedikit membahas tentang seni berbicara oleh Larry King. Dalam buku yang ditulisnya, Larry King menjelaskan tentang poin-poin yang harus diperhatikan saat berbicara di depan publik, diantaranya adalah :

1. Kejujuran

Jujurlah kepada audiens tentang apa yang terjadi, misalnya Anda gugup sebelum berbicara, maka sampaikanlah

kepada audiens bahwa Anda merasa gugup. Dengan demikian Anda berhasil berkomunikasi dengan mereka, bukan hanya apa yang anda komunikasikan, tapi juga dilema yang anda hadapi. Audiens akan mengerti apa yang menjadi kendala Anda sehingga kekurangan Anda ketika berbicara bisa mereka terima.

2. Mengatasi rasa malu

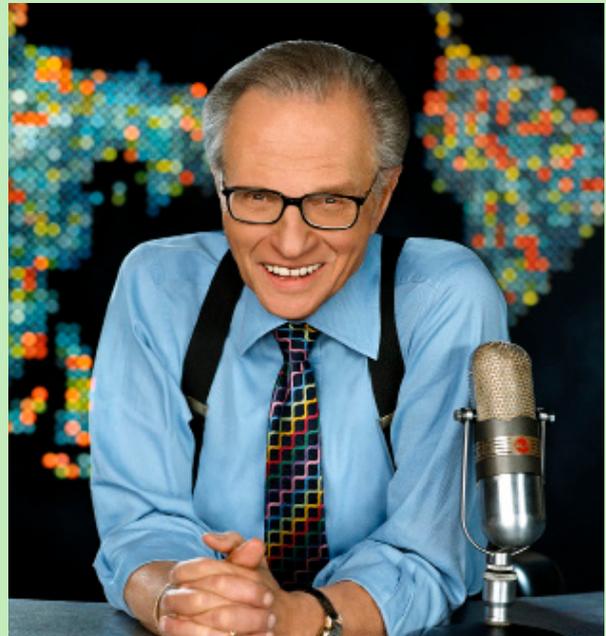
Cara terbaik mengatasi rasa malu adalah dengan mengingatkan diri Anda sendiri bahwa kita semua adalah manusia, untuk itu kita tidak perlu gugup meski harus berbicara dengan seorang professor dengan empat gelar atau berbicara dengan gubernur di provinsi Anda.

Cobalah untuk tetap santai walaupun Anda sedang berbicara di depan orang yang sangat penting. Ingatlah, orang yang Anda ajak bicara akan semakin menikmati percakapan apabila mereka tahu bahwa Anda juga menikmatinya juga.

3. Bahasa tubuh

Bahasa tubuh sama halnya dengan bahasa lisan. Bahasa tubuh adalah bagian dari percakapan dan komunikasi. Jika terjadi secara alami, bahasa tubuh akan menjadi bentuk komunikasi yang sangat efektif. Jika dibuat-buat, akan tampak seperti palsu.

Berposelah secara alami, natural, jangan dibuat-buat dan usahakan agar



Larry King merupakan praktisi komunikasi yang mumpuni di bidangnya. Ia merupakan salah satu pembawa acara terbaik yang diakui dunia.

anda dapat membuat kontak mata dengan audiens.

4. Jangan berbicara tanpa persiapan

Buatlah persiapan sebelum mulai berbicara, coba buatlah catatan kecil baik itu tentang acara itu sendiri atau hal-hal yang akan Anda sampaikan maupun tanyakan.

Dengan adanya persiapan maka Anda akan berbicara secara lancar. Apabila tidak ada persiapan, Anda akan melantur, ragu-ragu, dan berkata 'emmm...' berkali-kali sehingga akhirnya presentasi Anda akan menjadi buruk.

5. Bicarakanlah hal yang Anda pahami

Ini adalah kunci pertama untuk menjadi pembicara publik yang sukses. Banyak pembicara pemula membuat kesalahan dengan mengambil pokok bahasan yang tidak sepenuhnya mereka pahami

hingga akibatnya audiens merasa bosan dan juga tidak merasa yakin dengan pokok pembahasannya.

6. Kenalilah audiens Anda

Pastikan Anda tahu siapa audiens Anda, apa minat-minta mereka, dan apa yang mereka mau dengarkan dari Anda. Dengan mengetahui latar belakang dan apa saja yang mereka sukai, Anda akan lebih diperhatikan oleh audiens. Dan sebaliknya, jangan mengandaikan bahwa semua audiens mengenal Anda.

7. Kembangkanlah suara Anda sebaik-baiknya

Suara itu penting. Suara Anda saat berbicara mencerminkan



ciri khas dan otoritas Anda. Tentunya respon audiens akan berbeda apabila Anda berbicara dengan suara kecil, lemas, dan tidak jelas dibandingkan dengan anda berbicara dengan lantang, jelas, dan bersemangat. Pelajarilah pemenggalan kata dan perubahan suara yang ingin Anda gunakan.

Beberapa pembicara yang menggunakan teks, menggarisbawahi kata-kata yang ingin mereka tekankan. Gunanya ada dua; memastikan Anda memberikan tekanan pada saat yang tepat, dan memastikan bahwa Anda tidak berbicara secara monoton.

8. Jangan takut membuat humor

Jangan terlalu serius dalam berbicara apabila tidak diperlukan. Meskipun Anda memilih topik pembicaraan yang serius, sebagian besar pendengar tetap senang mendengar humor kecil. Tentunya Anda juga harus melihat situasi dimana Anda bisa menyelipkan sedikit humor dan dimana Anda harus berbicara secara serius.

Pada intinya segala bidang apapun akan Anda kuasai apabila Anda terus berlatih dan berkali-kali mencobanya. Memberanikan diri untuk berbicara kepada publik setiap ada kesempatan akan melatih Anda untuk terbiasa dan percaya diri. Jadi, jangan takut untuk mencoba. (UH)

Sumber gambar: Google

Pemaparan Program...

Lanjutan dari halaman 51

Munir menyadari jika ada banyak persoalan yang dihadapi untuk Program 35.000 MW, seperti masalah tanah, perizinan, kesiapan industri, dan lainnya. Namun ia tetap optimis jika program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Terlebih dengan adanya berbagai terobosan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM yang diharapkan dapat membuat proses perizinan menjadi lebih cepat dan mudah.

Menurut Munir, Program 35.000 MW bukan hanya pekerjaan pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Munir mengapresiasi Pameran IES 2015 karena dapat mensinergikan stakeholders yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan untuk duduk bersama.



Booth DJK pada Pameran IES 2015 yang bertempat di Istora Senayan. Pameran berlangsung tanggal 19 Maret - 21 Maret 2015.

Pameran IES 2015 diselenggarakan oleh Koperasi LEB Ditjen Ketenagalistrikan bekerjasama dengan D'Prada. Peserta pameran berasal dari instansi pemerintah, BUMN, juga perusahaan swasta. Tema yang diusung adalah Akselerasi Pembangunan Ketenagalistrikan untuk Ketahanan Listrik Nasional. Pameran berlangsung sejak tanggal 19 Maret hingga 21 Maret 2015 dan akan diisi dengan berbagai seminar terkait ketenagalistrikan. (AMH)

Ditjen Ketenagalistrikan Aktifkan Kembali Senam Pagi

Jam belum menunjukkan pukul tujuh pagi. Namun suara pengeras suara sudah pecah di Plaza Elekrika Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tepat pukul tujuh, dari pengeras suara yang memenuhi ruangan Ditjen Ketenagalistrikan, suara Kasubag Umum Repura Sewana Sigit memanggil para pegawai untuk berkumpul di lapangan Plaza Elekrika. Di sana, para pegawai sudah ditunggu dua instruktur senam yang siap memandu jalannya senam pagi.

Awalnya, saat pengaturan barisan dan gerakan pemanasan, lapangan belum ramai oleh pegawai. Namun satu persatu pegawai datang dan memenuhi lapangan yang biasa digunakan untuk tenis tersebut. Dimulai dari gerakan pemanasan, sedikit demi sedikit tempo senam memuncak. Keringat bercucuran

seiring dengan teriknya matahari. Meski begitu para pejabat dan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan tetap semangat mengikuti gerakan instruktur hingga gerakan pendinginan usai. Tampak di deretan depan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko dan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Asep Rachman.

Setelah lebih dari empat tahun kegiatan senam pagi berhenti, mulai Jumat (22/5), setiap Jumat di Plaza Elekrika Ditjen Ketenagalistrikan akan diselenggarakan senam pagi. Ide ini muncul dari Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko yang menghendaki adanya acara kebersamaan di antara para pegawai.

"Biar saling mengenal dan akrab," ungkap Sujatmiko setelah selesai

senam pagi. Kegiatan senam pagi ini menurutnya penting untuk menyehatkan jasmani dan rohani, serta sebagai ajang silaturahmi diantara pegawai. Terbukti dengan kegiatan senam pagi ini, semua karyawan dapat berkumpul dan berolahraga bersama. Diharapkan produktivitas dan semangat kerja para pegawai dapat ditingkatkan dengan kegiatan ini.

Senam pagi ditutup dengan santap bubur kacang hijau bersama. Momen tersebut tak disia-siakan oleh para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk berkenalan dan berfoto bersama dengan Sujatmiko. Ada pula beberapa pegawai yang melanjutkan olahraga dengan bermain futsal. Tepat pukul setengah sembilan, semua pegawai kembali ke ruangan dan melanjutkan kerja dengan gembira. (PSJ)



Matikan lampu ketika sudah
tidak digunakan



Save **MORE,**
Pay **Less**



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

A nighttime photograph of a city skyline with several tall, illuminated skyscrapers. In the foreground, a road or bridge over water shows long, colorful light trails from moving vehicles, creating a sense of motion and energy.

Save Electricity for Brighter Society



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id